



Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia



# LAPORAN KINERJA

---

# SEKRETARIAT JENDERAL

# TAHUN 2023



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112  
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: [itjen@pertanian.go.id](mailto:itjen@pertanian.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 5 Februari 2024  
INSPEKTUR IV



Drh. IGMN Kuswandana, MM, CGCAE  
NIP. 19660408 199403 1 001



## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja instansi.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan target yang terdapat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Jenderal. Analisis capaian kinerja dilakukan tidak hanya atas capaian kinerja tahun 2023 namun juga dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target jangka menengah pada periode Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024. Hasil analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.



Sekretaris Jenderal,

Dr. Prihasto Setyanto, M.Sc.  
NIP. 196908161995031001









## RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Kerja 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka Sekretariat Jenderal menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran Sekretariat Jenderal adalah: (1) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal dengan target tahun 2023 sebesar 32,97 dan (2) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal dengan target tahun 2023 sebesar 93,18. Sasaran dan indikator tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2023.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal dengan memperhitungkan capaian tahun 2022 memiliki capaian 34,72 atau capaian kinerja 105,31% dengan kategori "**sangat berhasil**", sedangkan IKSP Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal memiliki capaian 92,05 atau capaian kinerja 98,79% dengan kategori "**berhasil**". Dengan keberhasilan capaian kinerja ini, Sekretariat Jenderal dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai koordinator dan pembina seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan sangat baik.

Kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2023, selain diukur melalui capaian target kinerja, juga menunjukkan prestasi lainnya yaitu berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain: 1) Penghargaan praktik terbaik inovasi pelayanan publik; 2) Predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahunan 2023; 3) BKN Award 2023; 4) Penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022; 5) Anugerah Top Digital Implementation 2023; 6) Penghargaan Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023 7) Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman RI; dan 8) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp1.339.017.899.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.326.392.582.093,- atau 99,06%.

Target yang belum tercapai secara maksimal akan diupayakan melalui strategi, antara lain penyesuaian RPD pada lampiran halaman III DIPA, melakukan pengawalan dan pengawasan penyusunan informasi kinerja, koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan melalui aplikasi SMART dan SAKTI serta menindaklanjuti





rekomendasi hasil penilaian RB, menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian.



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal.....	7
1.4 Dukungan Anggaran.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan .....	15
3.1.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....	16
3.1.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	17
3.1.4 Apresiasi Eksternal atas Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal .....	33
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	34
3.3 Rencana Aksi Perbaikan.....	35
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>39</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rincian Perubahan Pagu Sekretariat Jenderal Tahun 2023 .....	10
Tabel 2.	Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021-2024 .....	12
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 .....	13
Tabel 4.	Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 .....	16
Tabel 5.	Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran Program Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Tahun 2023 ..	26
Tabel 6.	Perhitungan NKA Unit Eselon I .....	29
Tabel 7.	Capaian EKA/NKA Satker Sekretariat Jenderal tahun 2023.....	30
Tabel 8.	Perhitungan NKA Satker lingkup Kementerian/Lembaga .....	31
Tabel 9.	Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran Program Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 .....	33
Tabel 10.	Daftar Penghargaan yang Diterima oleh Sekretariat Jenderal Tahun 2023 .....	34
Tabel 11.	Rencana Aksi Perbaikan Tahun 2024 .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian .....	2
Gambar 2.	Perkembangan Jumlah Pegawai Sekretariat Jendral Tahun 2022- 2023 .....	8
Gambar 3.	Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan dan Pendidikan.....	8
Gambar 4.	Sebaran Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	9
Gambar 5.	Dinamika Perubahan Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023.....	9
Gambar 6.	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2022 .....	19
Gambar 7.	Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 .....	19
Gambar 8.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal 2020-2023 .....	27
Gambar 9.	Dashboard Capaian Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023.....	28
Gambar 10.	Tampilan Capaian IKPA Sekretariat Jenderal Tahun 2023 .....	35











## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tidak hanya disusun ditingkat Kementerian/Lembaga, namun juga disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja.

Sekretariat Jenderal sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan Kinerja ini juga merupakan alat untuk mendapatkan masukan/umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ke depan.

Laporan Kinerja merupakan wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan; (b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan; (c) menyusun Perjanjian Kinerja; (d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian dalam upaya mengatasi permasalahan fundamental, isu-isu aktual, dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul; (e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara seksama; (f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya; dan g) menyajikan seluruh hasil evaluasi dalam Laporan Kinerja. Oleh sebab itu, laporan kinerja merupakan bagian penting dari penyampaian pelaksanaan SAKIP, yang penyusunannya harus memperhatikan aspek perencanaan, pengukuran, evaluasi dan hasil analisisnya serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan.





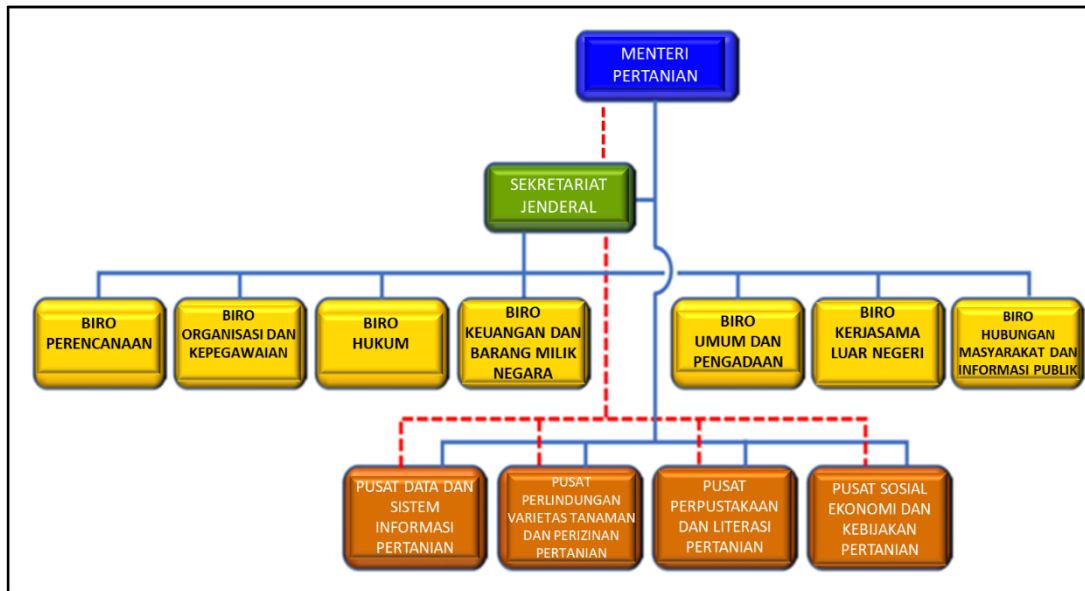
## 1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi yang tertuang dalam Pasal 8 pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022, yaitu:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal sesuai dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2022, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian





Berdasarkan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal didukung oleh 7 (tujuh) Biro dan 4 (empat) Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal. Tugas dan fungsi masing-masing Biro/Pusat sebagai berikut:

1. **Biro Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian, dan kerja sama dalam negeri di bidang pertanian;
  - b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebijakan pembangunan pertanian dan bahan pimpinan;
  - c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian;
  - d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.
2. **Biro Organisasi dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan reformasi birokrasi, serta pembinaan dan pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - b. koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi dan budaya kerja;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional;
  - d. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
  - e. pengelolaan manajemen talenta;
  - f. pelaksanaan mutasi pegawai; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.
3. **Biro Hukum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan naskah perjanjian, serta pelaksanaan advokasi hukum. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dan evaluasi peraturan perundangundangan;
  - b. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan naskah perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; dan





- d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.
- 4. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, dan piutang lingkup Kementerian Pertanian;
  - b. Pelaksanaan akuntansi, verifikasi laporan keuangan dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian;
  - c. Pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian;
  - d. koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Sekretariat Jenderal;
  - e. pengelolaan keuangan dan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- 5. Biro Umum dan Pengadaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
  - b. pengelolaan kearsipan;
  - c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - d. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik sektoral di bidang pertanian;
  - e. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.
- 6. Biro Kerjasama Luar Negeri** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
  - b. Penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;
  - c. Penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
  - d. Penyiapan kerja sama, dan koordinasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;







- e. Pelaksanaan administrasi Atase Pertanian dan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerjasama Luar Negeri.

- 7. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, informasi publik, keprotokolan dan hubungan antar lembaga. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (Humas dan IP) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga dan pelayanan informasi publik;
  - b. penyusunan strategi komunikasi publik bidang pertanian;
  - c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi strategi komunikasi dan informasi publik di bidang pertanian;
  - d. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
- 8. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian;
  - c. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi komoditas pertanian;
  - d. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi nonkomoditas pertanian;
  - e. pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- 9. Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pelayanan hukum dan kerja sama di bidang perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian;





- c. pengelolaan sistem layanan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman dan perizinan pertanian;
- d. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;
- e. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
- f. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan, dan pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;
- g. koordinasi pelayanan perizinan pertanian;
- h. pelaksanaan pengawasan perizinan pertanian;
- i. penyebaran informasi perlindungan, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

**10. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan literasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perpustakaan dan literasi pertanian;
- b. pengelolaan sumber daya perpustakaan dan literasi pertanian;
- c. pembinaan sumber daya perpustakaan dan literasi pertanian;
- d. pemeliharaan koleksi perpustakaan, penyebaran pengetahuan pertanian, dan penguatan literasi pertanian;
- e. pelayanan di bidang perpustakaan dan literasi pertanian;
- f. pengelolaan koleksi deposit dan penerbitan Kementerian.

**11. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian** mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan analisis sosial ekonomi pertanian;
- c. pelaksanaan analisis kebijakan dan isu strategis di bidang pertanian;
- d. penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian;
- e. pemberian layanan teknis analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- f. pelaksanaan kerja sama dan penyebarluasan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
- h. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.





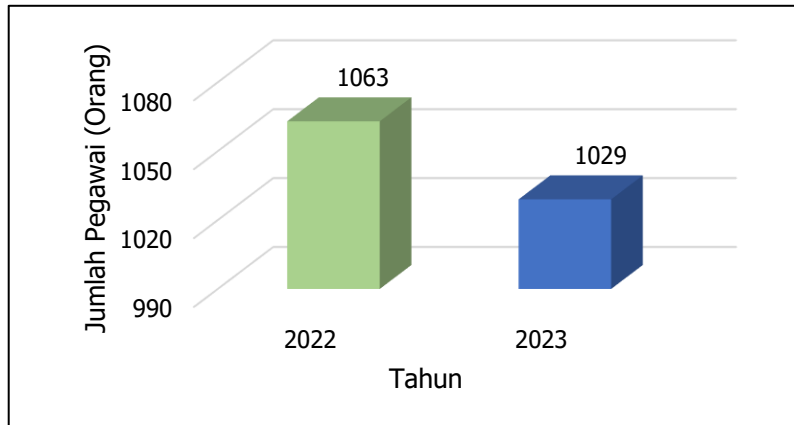
Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal, menjadi unit kerja yang tugas dan fungsinya mendukung kinerja Sekretariat Jenderal. Dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan, namun demikian tantangan dan permasalahan tersebut menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Sekretariat Jenderal pada tahun 2023 antara lain:

1. Kebijakan terkait kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian belum mengikuti dinamika perubahan kebijakan nasional, seperti a) Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang belum disesuaikan dengan ketentuan SKJ nasional yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, b) Kebijakan pola karier instansi yang belum sesuai standar ketentuan nasional.
2. Mekanisme penetapan dan pengukuran indikator dan target kinerja belum disusun dengan ideal yang sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya yang dikelola Kementerian Pertanian.
3. Pemanfaatan hasil pengukuran dan penilaian kinerja untuk pengembangan karier pegawai baik dalam proses promosi maupun mutasi pegawai belum dioptimalkan dengan baik dan belum dioptimalkan sebagai bagian dari proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, serta penyesuaian target kinerja unit kerja kedepan.
4. Penyusunan kebijakan belum dilakukan melalui analisis yang lebih mendalam dengan memperhatikan komponen penyusunan kebijakan dan disasarkan pada evaluasi atas kebijakan/prosedur secara sistematis dan berkala.
5. Akuntabilitas dalam hal tata kelola asset Kementerian Pertanian, termasuk sistem pengadaan, mulai dari perencanaan hingga realisasi pengadaan (transaksional dan pencatatan) belum dilaksanakan dengan optimal, sehingga diharapkan dapat mengelola risiko pengadaan.
6. Implementasi manajemen risiko yang masih belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga pada level strategis dan operasional belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.
7. Akurasi data yang tersedia masih perlu ditingkatkan sehingga perlu penguatan sinkronisasi dan kolaborasi penyediaan data yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas data secara berkesinambungan.

### 1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2023 berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan sebaran pada Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022. Perkembangan jumlah pegawai Sekretariat Jenderal tahun 2022-2023 dapat dilihat pada gambar 2.

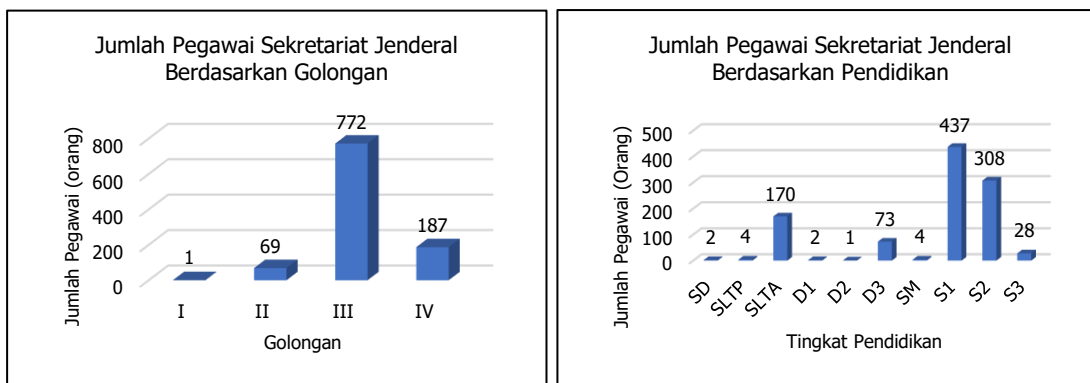




Gambar 2. Perkembangan Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2022- 2023

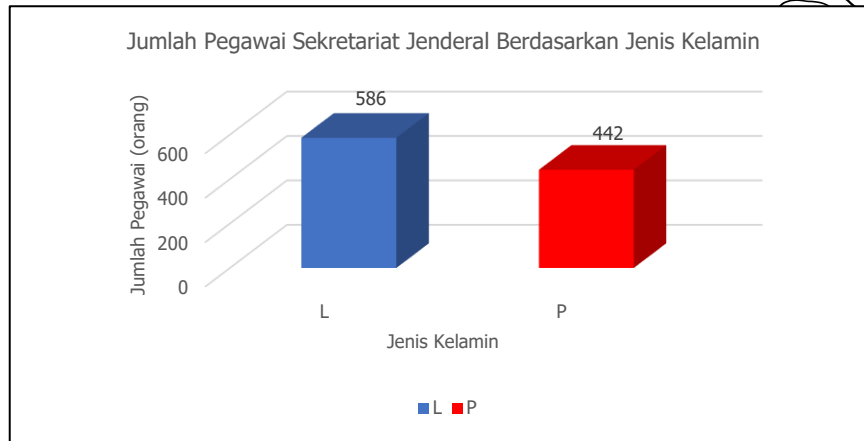
Total pegawai Sekretariat Jenderal pada tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai Sekretariat Jenderal tahun 2022, yaitu dari total pegawai 1.063 orang pada tahun 2022 menjadi 1029 orang pada tahun 2023, atau mengalami pengurangan sebanyak 34 orang (3,2%). Pengurangan tersebut disebabkan pada tahun 2023 jumlah pegawai yang memasuki masa purna bakti melebihi penerimaan pegawai baru di lingkup Sekretariat Jenderal.

Keragaan pegawai Sekretariat Jenderal juga dapat dibedakan berdasarkan golongan, pendidikan, dan jenis kelamin tahun 2023, yang dapat dilihat pada gambar 3. Tahun 2023, jumlah total pegawai Sekretariat Jenderal sebanyak 1.029 orang yang sebagian besar termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III yang berjumlah 772 orang atau sebesar 75,02%. Keragaan pegawai Sekretariat Jenderal jika dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar merupakan lulusan S1 yang berjumlah 437 orang atau sebesar 42,46%, dan jika dilihat dari jenis kelamin sebagian besar pegawai Sekretariat Jenderal berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 586 orang atau sebesar 56,95% dari total jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023. Secara rinci jumlah dan sebaran pegawai Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



Gambar 3. Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

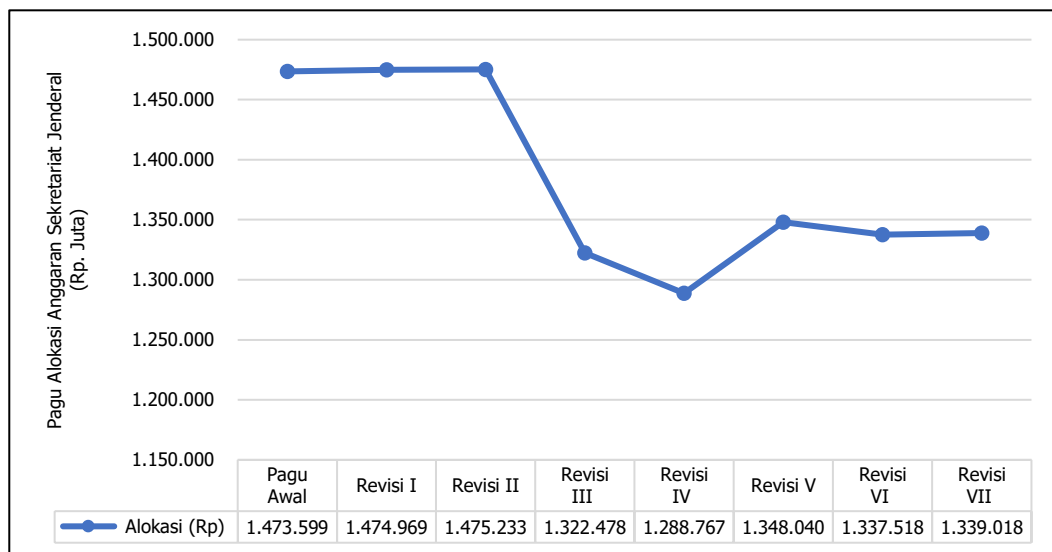




Gambar 4. Sebaran Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

### 1.4 Dukungan Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 pada DIPA awal sebesar Rp1.473.598.597.000,- yang selanjutnya selama tahun anggaran 2023 pagu tersebut mengalami perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga menjadi Rp1.339.017.899.000,-. Perkembangan perubahan alokasi anggaran Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Dinamika Perubahan Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Perubahan anggaran Sekretariat Jenderal disebabkan karena adanya penambahan berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pemenuhan belanja pegawai, dan penambahan hibah langsung luar negeri serta pengurangan anggaran berupa blokir *automatic adjustment* (AA) dan revisi anggaran mendukung upaya khusus mendukung peningkatan produksi padi dan jagung. Secara rinci perubahan pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.





Tabel 1. Rincian Perubahan Pagu Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Keterangan	Bulan	Alokasi (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
1	Pagu Alokasi Anggaran	Oktober 2022	1.473.598.597.000	
2	Penambahan PNBP di PPVTPP	Mei 2023	1.474.968.697.000	1.370.100.000
3	Penambahan Hibah Langsung Luar Negeri di PSEKP	Juni 2023	1.475.233.379.000	264.682.000
4	Pengurangan Alokasi Anggaran yang Berasal dari Blokir AA Belanja Pegawai TA 2023 yang direalokasi ke BA BUN	Juli 2023	1.322.477.989.000	(152.755.390.000)
5	Pengurangan Alokasi Anggaran yang Berasal dari Blokir AA Non Belanja Pegawai TA 2023 yang akan direalokasi ke BA BUN	Oktober 2023	1.288.766.670.000	(33.711.319.000)
6	Pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai pada alokasi Tunjangan Kinerja dan Pergeseran anggaran Belanja Pegawai ke Belanja Non Operasional dalam rangka Penguatan Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik	Oktober 2023	1.348.039.670.000	59.273.000.000
7	Revisi mendukung Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebagai antisipasi terjadinya penurunan produksi	November 2023	1.337.517.912.000	(10.521.758.000)
8	Penambahan Hibah Langsung Luar Negeri di PSEKP	Desember 2023	1.339.017.899.000	1.499.987.000

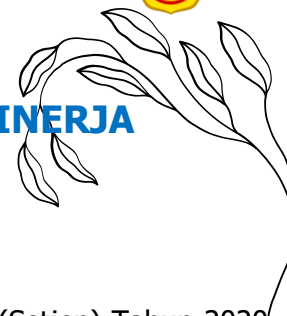
Sumber: Biro Perencanaan, 2023







## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



### 2.1 Rencana Strategis

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) Tahun 2020-2024 Revisi II berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal (Kepsekjen) Kementerian Pertanian nomor 3817/KPTS/RC.020/A/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Kepsekjen nomor 1818/Kpts/RC.020/06/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, ditetapkan Visi dan Misi Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

#### Visi

"Kredibel, Akuntabel dan Professional dalam Memberi Dukungan Manajemen dan Administratif Kementerian Pertanian untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"

#### Misi

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal
2. Membangun pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

#### Tujuan

1. Terwujudnya reformasi birokrasi, terbangunnya sistem manajemen, koordinasi serta layanan administrasi dan teknis lainnya baik di lingkup Sekretariat Jenderal dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal, Tahun 2020 ditargetkan tercapai 32,06 dan Tahun 2024 sebesar 33,20.
2. Kualitas pengelolaan kinerja anggaran Sekretariat Jenderal yang terus meningkat dengan indikator nilai kinerja anggaran Sekretariat Jenderal, Tahun 2020 ditargetkan tercapai sebesar 92,04 dan Tahun 2024 sebesar 93,55

#### Sasaran

1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
2. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.





## Arah Kebijakan

"Membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang sesuai azas *clean government and good governance*".

## Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah kebijakan, Sekretariat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Penerapan manajemen talenta ASN;
  - b. Peningkatan sistem merit ASN;
  - c. Penyederhanaan eselonisasi; dan
  - d. Penataan jabatan fungsional.
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
  - a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah; dan
  - b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
  - a. Perluasan implementasi sistem integritas;
  - b. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
  - c. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
4. Transformasi pelayanan publik, melalui:
  - a. Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
  - b. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
  - c. Penguatan ekosistem inovasi organisasi; dan
  - d. Penguatan pelayanan terpadu.

Sasaran Program beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2021-2024 sesuai dengan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi II, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021-2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal	Nilai	32,48	32,73	32,97	33,20
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	Nilai	92,42	92,80	93,18	93,55

Sumber: Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi II





## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perjanjian Kinerja berupa lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi kedua Nomor 3817/KPTS/RC.020/A/10/2021, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 disusun untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal menetapkan 2 (dua) sasaran program dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal	32,97 Nilai
2.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	93,18 Nilai

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Perjanjian Kinerja telah ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2022, setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Seiring dengan dinamika perubahan yang sangat dinamis, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan 1 (satu) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK), yaitu pada bulan November tahun 2023. Revisi PK dilakukan karena adanya pergantian pejabat dan revisi alokasi anggaran lingkup Sekretariat Jenderal, yang dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Revisi PK dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, khususnya pada lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dengan kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau





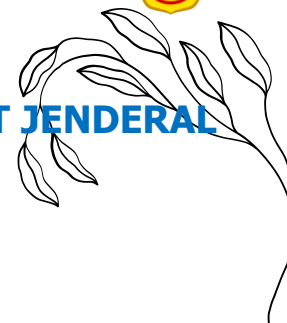
mutasi pejabat; 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2023 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka evaluasi kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan kategori capaian kinerja melalui metode scoring dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Berhasil : untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%.
2. Berhasil : untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%.
3. Cukup Berhasil : untuk capaian kinerja antara 60% sampai dengan 79%.
4. Kurang Berhasil : untuk capaian kinerja kurang dari 60%.

Pengukuran indikator kinerja dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

#### 1. **lead indicator**

Indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas;

#### 2. **lag indicator**

Indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II harus menggunakan *lag indicator*. Pada PK Sekretaris Jenderal tahun 2023, dari 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal dan Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal, keduanya adalah merupakan *lag indicator*.





### 3.1.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sekretariat Jenderal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran program, indikator kinerja sasaran program serta target yang ingin dicapai tahun 2023. Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pertanian atas target kinerja Sekretaris Jenderal dalam mendukung pencapaian kinerja Menteri Pertanian tahun 2023.

Evaluasi kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya (*cross-section*), serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2022 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya sehingga mampu menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 2 (dua) sasaran program dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran program sebagai standar kinerja tahun 2023. Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 seperti yang dijabarkan pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal	32,97	34,72*)	105,31	<b>Sangat Berhasil</b>
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	93,18	92,05	98,79	<b>Berhasil</b>

Sumber: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal Kementan, 2023

Keterangan:

\*) Realisasi Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Tahun 2023 merupakan nilai tahun 2022 dikarenakan pelaksanaan evaluasi PMPRB pada tahun 2023 dihentikan.







Untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja sasaran program tersebut, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian merencanakan 6 kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu:

1. Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian, dengan pagu anggaran senilai Rp4.960.385.000,-
2. Koordinasi dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian, dengan pagu anggaran senilai Rp8.473.206.000,-
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM, dengan pagu anggaran senilai Rp9.165.094.000,-
4. Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dengan pagu anggaran senilai Rp21.712.567.000,-
5. Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum, dengan pagu anggaran senilai Rp1.293.339.645.000,-
6. Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan dan Perpustakaan Pertanian, dengan pagu anggaran senilai Rp76.683.684.000,-

Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dikatakan baik. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2023 tersebut senilai Rp1.339.017.899.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM-SPAN per 17 Januari 2023 senilai Rp1.326.392.582.093,- atau sebesar 99,06%. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dicapai melalui serapan anggaran sebesar 99,06%. Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) serta serapan anggaran secara detil dibahas pada sub bab berikutnya.

### 3.1.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2023 dengan kinerja tahun 2022 serta beberapa tahun sebelumnya. Perbandingan kinerja juga dilakukan terhadap target akhir kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 serta membandingkan dengan standar nasional untuk indikator kinerja sasaran program yang memiliki standar nasional. Selain itu, evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat dijabarkan pada sub bab berikut ini:





a. **Nilai Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian**

SP 1. IKU 1 <b>Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal</b>	
Target 32,97	Realisasi 34,72*)
% Capaian 105,31% <b>Sangat Berhasil</b>	

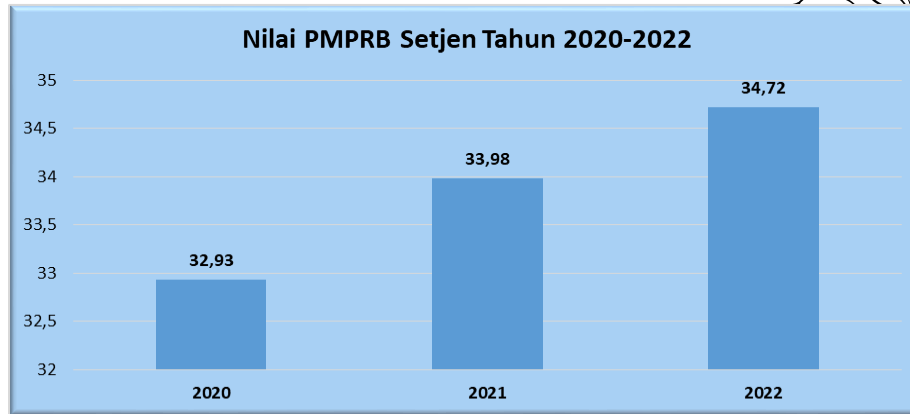
Keterangan:

\*) Realisasi Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Tahun 2023 merupakan nilai tahun 2022 dikarenakan pelaksanaan evaluasi PMPRB pada tahun 2023 dihentikan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi disampaikan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi PMPRB telah dihentikan. Sehingga capaian indikator Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal tahun 2023 yang disajikan adalah Nilai PMPRB Tahun 2022. Capaian indikator nilai PMPRB Sekretariat Jenderal pada tahun 2023 menggunakan data realisasi nilai PMPRB Tahun 2022, karena pelaksanaan evaluasi PMPRB pada tahun 2023 tidak dilaksanakan. Realisasi sebesar 34,72 melampaui target sebesar 32,97 atau capaiannya sebesar 105,31%, dengan kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Capaian nilai evaluasi RB Sekretariat Jenderal tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target akhir tahun Renstra 2020-2024 dikarenakan terdapat perubahan metode penilaian RB. Grafik perkembangan capaian Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Gambar 6.

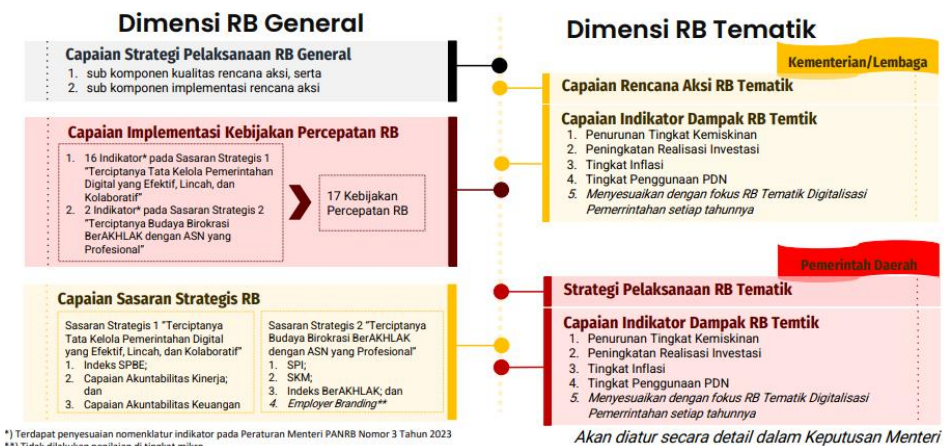




Gambar 6. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2022

Berdasarkan surat Kementerian PAN-RB, Pemerintah berfokus agar Reformasi Birokrasi (RB) memberikan dampak nyata khususnya untuk mendukung percepatan kinerja instansi pemerintah dan capaian indikator pembangunan nasional. Disamping itu, upaya pengumpulan informasi berbagai praktik baik dilakukan untuk menjadi bahan pembelajaran dalam implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi. Sehingga kedepan informasi praktik baik diharapkan menjadi salah satu sumber inspirasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan dan mengembangkan Reformasi Birokrasi secara nyata dan berdampak.

Mengacu pada: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, (2) Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi RB Tahun 2023, dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka terdapat perubahan evaluasi dan pengukuran kinerja indikator RB. Komponen penilaian evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023-2024 menggunakan dua pendekatan yaitu dimensi RB General dan dimensi Rb tematik. Secara rinci, komponen penilaian evaluasi RB untuk tahun 2023-2024 dapat ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024





Pada tahun 2023, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi Berdampak, Sekretariat Jenderal menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 24 kegiatan utama, yaitu:

- |  |   |
|--|---|
| 1) Penyederhanaan Birokrasi                                      | 13) Pelaksanaan data statistik sektoral                           |
| 2) Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi ASN | 14) Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                |
| 3) Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementan                          | 15) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset                       |
| 4) Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi                           | 16) Penataan Jabatan Fungsional (JF)                              |
| 5) Pelaksanaan pelayanan publik digital                          | 17) Penguatan Manajemen talenta ASN                               |
| 6) Pembangunan ZI di unit kerja                                  | 18) Pelaksanaan Learning of Development serta digital mindset ASN |
| 7) Penguatan implmentasi SPIP                                    | 19) Pelaksanaan transformasi digital ASN                          |
| 8) Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat                    | 20) Pengelolaan pegawai ASN berbasis digital                      |
| 9) Penguatan upaya pencegahan korupsi                            | 21) Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN                               |
| 10) Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik                     | 22) Penguatan Sistem Merit  |
| 11) Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan         | 23) Pelaksanaan Core Values ASN                                   |
| 12) Pelaksanaan arsip digital                                    | 24) Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima                            |

Proses evaluasi RB dilaksanakan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan utama yaitu evaluasi perencanaan RB dan evaluasi pelaksanaan RB. Evaluasi perencanaan RB dilakukan untuk memastikan *road map* dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan K/L/D. Evaluasi pelaksanaan RB dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di internal kementerian/lembaga dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi, yang dalam hal ini untuk lingkup Kementerian Pertanian, evaluasi internal RB dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Proses evaluasi internal RB Kementerian Pertanian tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal pada bulan Oktober 2023. Hasil penilaian tersebut disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian





Pertanian Tahun 2023 Nomor. B.3840/OT.240/G/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023. Evaluasi internal dilakukan melalui konfirmasi, klarifikasi, telaah dan analisis, serta diskusi/ wawancara dengan penanggungjawab kegiatan utama RB untuk memastikan kesesuaian (*reliability*) dan kebenaran (*validity*) dokumen (*evidence*) guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di Kementerian Pertanian termasuk Sekretariat Jenderal.

Hasil evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan 24 (dua puluh empat) kegiatan utama menunjukkan capaian RB General Sekretariat Jenderal sampai dengan Triwulan (TW) III dengan rerata 80.43%, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam *Road Map* RB Nasional telah ditetapkan dan dijabarkan pada *Road Map* RB Kementerian Pertanian. *Road Map* RB Kementerian Pertanian telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 - 2024;
- 2) Kementerian Pertanian telah melakukan Revisi III Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 telah mengakomodir program-program strategis nasional yang dijabarkan dalam rencana aksi RB tematik dan RB general;
- 3) Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB Kementerian Pertanian Tahun 2022.

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam operasionalisasi program/kegiatan strategis reformasi birokrasi sebagai berikut:

- 1) Pohon kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor (CSF)* atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- 2) Komitmen pimpinan dalam percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Kementerian Pertanian perlu dioptimalkan;
- 3) Kualitas pelayanan publik belum dilakukan pemetaan dan dianalisis hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) yang dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- 4) Masih terdapat beberapa rencana aksi RB General yang belum didukung dengan anggaran yang memadai dan proporsional, antara lain: kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Kerja Lingkup Kementerian Pertanian, Rekonstruksi Kebijakan Kinerja ASN dan Evaluasinya;
- 5) Sistem pengukuran akuntabilitas kinerja unit kerja lingkup Kementerian Pertanian belum terintegrasi dan pengelolaan berbasis sistem yang berbeda-beda.





Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan RB Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk:

- 1) Berkoordinasi dengan Pimpinan unit kerja eselon I untuk mengakomodir 5 (lima) program strategis nasional ke dalam masing-masing subsektor secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound Goals* (SMART), mulai dari operasionalisasi hingga evaluasi hasil capaian kinerja;
- 2) Menginstruksikan kepada:
  - a) Kepala Biro Humas dan Informasi Publik untuk menderaskan capaian kinerja positif atas rencana aksi RB General dan RB Tematik Kementerian Pertanian secara terus-menerus dan berkelanjutan, melalui media massa dan media sosial
  - b) Kepala Biro Perencanaan, untuk: (i) Memonitor realisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pertanian Terintegrasi secara berkelanjutan; (ii) Melakukan Finishing Design Sistem Informasi *Business Intelligence Management Agriculture* (BIMA); (iii) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi RB Tematik dan RB General lingkup Kementerian Pertanian; (iv) Bekerjasama dengan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian untuk merancang mekanisme pengukuran dan metode evaluasi pencapaian hasil (*outcome*) RB Tematik berdasarkan tagging kegiatan yang telah disepakati dengan Bappenas;
  - c) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, untuk: (i) Melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASN (SIM-ASN) sesuai dengan dinamika perubahan teknologi dan regulasi/kebijakan; (ii) Melakukan finalisasi Rancangan pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Pengelolaan Kinerja ASN Lingkup Kementerian Pertanian; Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian tentang Manajemen Talenta ASN; (iii) Memonitor pencapaian pelaksanaan Forum Konsultan Publik (FKP)/*Public Hearing* di 69 (enam puluh sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP); dan (iv) Memastikan keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA), dan Jabatan Fungsional (JF);
  - d) Kepala Biro Hukum untuk segera memproses pengajuan penilaian dari: (i) Lembaga Administrasi Negara atas pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik; dan (ii) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara untuk: (i) Mensosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023







tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 412/KPTS/TU.040/M/07/2023 tentang Perjalanan Dinas Menggunakan Moda Transportasi Pesawat Udara bagi Pejabat Lingkup Kementerian Pertanian; dan (ii) Melakukan Pengembangan aplikasi E-Perjadin untuk selanjutnya dilaksanakan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian;

- f) Kepala Biro Umum dan Pengadaan untuk mengimplementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara konsisten dan menyeluruh terhadap seluruh fungsi aplikasi, khususnya fungsi pemberkasan arsip;

Dalam mendukung pencapaian kinerja nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2023 dan menindaklanjuti hasil evaluasi triwulan III pelaksanaan rencana aksi RB General, Sekretariat Jenderal melakukan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Kementerian Pertanian 2023 yang hasilnya secara rinci disajikan pada **Lampiran 3**.

Adapun secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal pada tahun 2023 mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

### **1) Penyederhanaan Struktur Organisasi/Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penataan organisasi dan Peraturan Menteri PANRB No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi, maka pasca penyederhanaan birokrasi lingkup kementerian Pertanian perlu ditindaklanjuti dengan penyederhanaan unit kerja pusat kementerian dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Wujud pelaksanaan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan di Kementerian Pertanian, selain penyederhanaan struktur organisasi, juga penting untuk dilakukan evaluasi kelembagaan yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, maka dilakukan pula evaluasi kelembagaan pusat pasca penyederhanaan birokrasi.

### **2) Penataan Manajemen Pegawai ASN**

Aspek penataan manajemen pegawai ASN meliputi beberapa kegiatan yang pada tahun 2023 ini difokuskan pada kegiatan: 1) Penyederhanaan Birokrasi; 2) Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN; 3) Penataan jabatan fungsional (JF); 4) Penguatan manajemen talenta ASN; 5) Pelaksanaan *learning of development* serta *digital mindset* ASN; 6) Pelaksanaan transformasi digital ASN; 7) Pengelolaan pegawai ASN berbasis digital; 8) Pengelolaan kinerja pegawai ASN; 9) Penguatan Sistem Merit; dan 10) Pelaksanaan *core values* ASN. Kegiatan penataan manajemen pegawai merupakan upaya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan memperkuat







kegiatan yang sudah berjalan namun belum optimal, sehingga penguatan kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan peningkatan kualitas SDM, peningkatan sistem kepegawaian dan penjenjangan karir pegawai, dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan tercipta organisasi yang agile terhadap dinamika perubahan. Penataan pegawai juga diharapkan mampu menciptakan pegawai yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (BerAKHLAK) dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik.

### **3) Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian**

Kegiatan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Kementerian Pertanian merupakan upaya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024.

### **4) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang terintegrasi**

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam rencana aksi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dilakukan dengan: 1) penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pertanian Terintegrasi (SP3T) dan 2) pengembangan Aplikasi Perencanaan Tingkat Pusat, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal

### **5) Pelaksanaan pelayanan publik prima, Pelayanan Publik Digital dan pengelolaan pengaduan masyarakat**

Pemberian pelayanan kepada publik merupakan agenda reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang prima, memanfaatkan sistem digital serta terus melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat

### **6) Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Dukungan Sekretariat Jenderal dalam penguatan implementasi SPIP pada Tahun 2023 adalah: 1) penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Pertanian yang dievaluasi oleh BPKP; 2) menyusun konsep kertas kerja penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja lingkup Kementerian Pertanian; 3) internasionalisasi pelaksanaan manajemen risiko lingkup Sekretariat Jenderal.





## 7) Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik dan pembentukan peraturan perundang-undangan

Reformasi Birokrasi dalam bidang hukum dilakukan melalui tata kelola kebijakan publik dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tata kelola kebijakan dilakukan dengan meningkatkan kualitas kebijakan yang dilakukan dengan tahapan penyusunan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, sehingga dapat terlaksananya tata kelola kebijakan publik. Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara komprehensif dan memenuhi asas-asas, tidak saling tumpang tindih, sehingga dapat mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum nasional.

## 8) Penataan data statistik sektoral dan digitalisasi arsip

Pentingnya data statistic dalam pembangunan menjadikan penataan data statistic sektoral menjadi agenda reformasi birokrasi, begitu juga dengan penataan arsip melalui sistem digitalisasi. Penataan data dilakukan dengan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) Kementerian Pertanian, dan pemanfaatan *agriculture war room* (AWR). Pengelolaan data juga termasuk data fisik berupa arsip yang juga didorong menggunakan sistem digitalisasi.

## 9) Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan dan aset

Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Kegiatan Elektronisasi pengadaan Pemanfaatan Sistem Pengadaan (e-Tendering, e- Purchasing, Tako Daring, Non e-tendering, non e-purchasing, dan e-kontrak. Selain itu dilakukan pula Penilaian Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang tercapai sebesar 100%, namun masih menghadapi beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: 1) Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga harus merubah user id dan membutuhkan waktu, adanya pemblokiran anggaran sehingga PPK tidak dapat mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP); 2) Revisi anggaran sehingga memerlukan waktu untuk mengubahnya; 3) Pemblokiran anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan proses pengadaan; dan 4) Produk impor (Non TKDN) yang memerlukan waktu lama dalam permohonan ijin persetujuan dari Menteri Pertanian.

Dalam mendukung pencapaian target Indikator PMPRB Sekretariat Jenderal tahun 2023, Sekretariat Jenderal mendapat dukungan anggaran senilai Rp 1.173.000.190.000,- dengan serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.162.610.102.057,- atau 99,11%. Serapan anggaran tersebut jika dikaitkan dengan **analisis efisiensi sumber daya anggaran**, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 22/2021), maka efisiensi untuk Indikator Kinerja Sasaran Program 1 yaitu Nilai





Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal tahun 2023 dalam pemanfaatan sumber daya anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran Program Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal Tahun 2023

TVK	RVK	%RVK	PAK	RAK	%RAK	PAK x % RVK	(PAK x % RVK)-RAK	Efisiensi ((PAK x %RVK)-RAK)/PAK
32,97	34,72	105,31%	1.173.000.190.000	1.162.610.102.057	99,11	1.235.286.500.089	72.676.398.032	0,062

$$\begin{aligned}
 NE &= 50\% + (0,062/20 \times 50) \\
 &= 0,5 + (0,071/20 \times 50) \\
 &= 0,5 + (0,155) \\
 &= 0,655 \text{ atau } 66\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumberdaya anggaran untuk indikator Nilai Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal tahun 2023 sebesar 66%. Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021, unit kerja dikatakan memiliki efisiensi apabila gap antara perencanaan dan realisasi kecil, yang mencerminkan kualitas dari perencanaan yang baik.

#### b. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal

SP 2. IKU 1 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	
Target 93,18	Realisasi 92,05
% Capaian 98,79 % <b>Berhasil</b>	

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan rangkaian proses yang meliputi pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja anggaran untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan pada tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I dan Satuan Kerja, yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan dilaporkan secara berjenjang melalui Aplikasi SMART Kementerian Keuangan Tahun 2023. Hasil penilaian evaluasi kinerja anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, dan tingkat satuan kerja. Oleh sebab itu, hasil evaluasi kinerja anggaran Sekretariat Jenderal adalah NKA Sekretariat Jenderal.

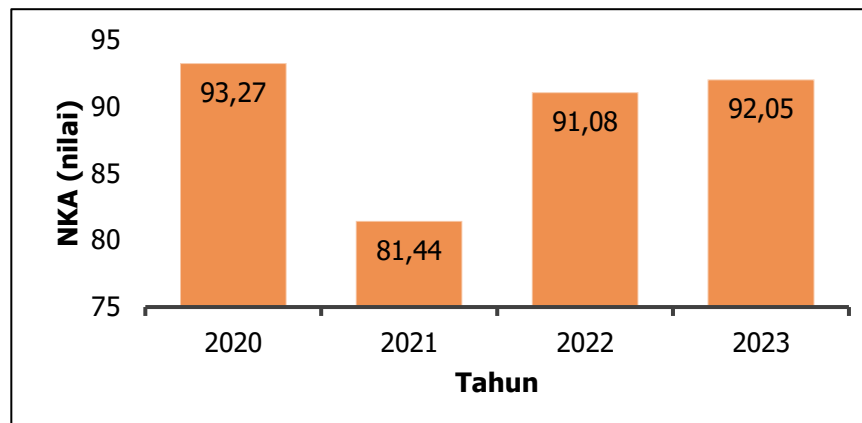
Berdasarkan hasil pelaporan satker Sekretariat Jenderal pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan Tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu sebesar 92,05 atau termasuk dalam kategori





"Sangat Baik". Capaian NKA sebesar 92,05 jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 93,18, maka capaian kinerja indikator nilai kinerja anggaran mencapai 98,79% atau kategori capaian kinerja "**Berhasil**".

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan 1,06% pada tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra 2020-2024 sebesar 93,55, maka capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 98,4%. Perolehan Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal selama 4 tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal 2020-2023

Kebijakan mekanisme evaluasi kinerja anggaran tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian pada tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana tertuang pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan terbaru ini merupakan Omnibus Law Penganggaran yang menggabungkan sebagian besar peraturan Kementerian Keuangan yang dianggap hampir sama dalam pelaksanaannya.

Pada implementasinya, substansi PMK Nomor 62 Tahun 2023 dinilai terlalu global, sehingga Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Peraturan ini akan dijadikan landasan regulasi pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran pada tahun 2024, sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja pada tahun 2023 masih mengacu pada PMK Nomor 22 Tahun 2021

Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal merupakan indikator keberhasilan untuk sasaran program terkelolanya anggaran Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas. Capaian kinerja anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SMART terdiri dari 7 variabel, yaitu:

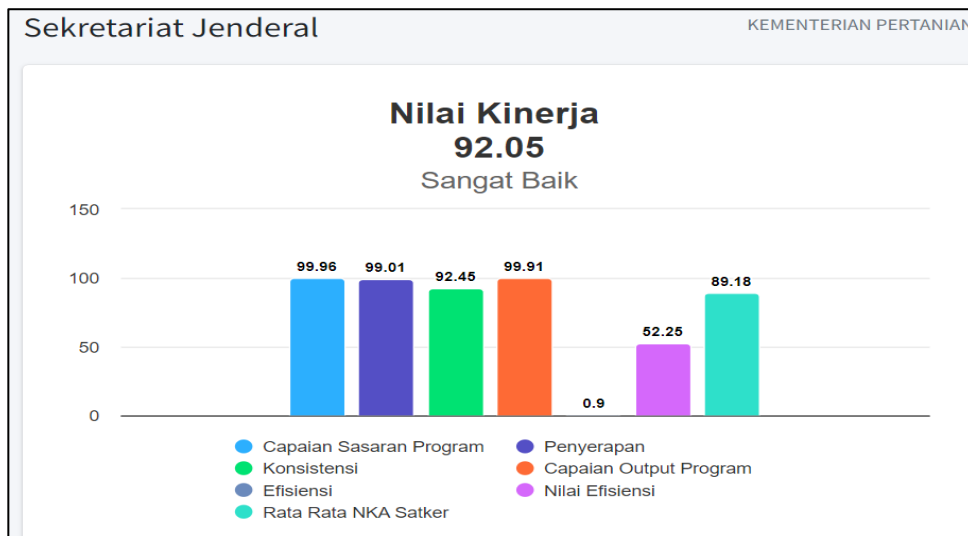
- 1) Capaian Sasaran Program;





- 2) Penyerapan;
- 3) Konsistensi;
- 4) Capaian Output Program;
- 5) Efisiensi;
- 6) Nilai Efisiensi; dan
- 7) Rata-rata NKA Satker.

Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja, termasuk di dalamnya tata cara pengukuran dan penilaian Nilai Kinerja Anggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021. Capaian NKA sebesar 92,05, mendudukkan Sekretariat Jenderal di peringkat kedua perolahan NKA Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 setelah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang memperoleh NKA sebesar 92,49, yang dapat dilihat pada rincian nilai NKA Eselon I Kementerian Pertanian pada **Lampiran 4**. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 ini merupakan hasil dari penilaian beberapa parameter yang terdiri dari Capaian Sasaran Program sebesar 99,96, Penyerapan sebesar 99,27, Konsistensi sebesar 92,45, Capaian Output Proram sebesar 99,91, Efisiensi sebesar 0,9, Nilai Efisiensi sebesar 52,25 dan Rata-rata NKA Satker sebesar 89,18. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan rincian nilai komponen pembentuk NKA Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Berdasarkan nilai NKA Sekretariat Jenderal, dapat dilihat bahwa capaian komponen pembentuk NKA yang masih rendah adalah efisiensi, nilai efisiensi dan rata-rata Satker. Dalam perhitungan nilai NKA Unit Eselon I, rata-rata NKA satker mempunyai bobot besar yaitu 50%, sehingga nilai rata-rata NKA satker sangat mempengaruhi pencapaian NKA Unit eselon I seperti yang ditunjukkan pada tabel 6.





Tabel 6. Perhitungan NKA Unit Eselon I

Perhitungan NKA Unit Es. I				
Indikator			Bobot	
Aspek Implementasi	Capaian Output Program	43,50%	33,33%	50%
	Efisiensi Output Program	28,60%		
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,20%		
	Penyerapan Anggaran	9,70%		
Aspek Manfaat	Capaian Sasaran Program		66,60%	
	Rata-Rata Nilai Kinerja Satker			50%

Sumber: PMK 22 Tahun 2021

### 1) Efisiensi

Efisiensi Sekretariat Jenderal mendapat nilai 0,9 lebih tinggi dibandingkan dengan efisiensi pada tahun 2022 yang hanya mencapai -1,15. Jika dihitung menggunakan rumus berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021, maka nilai efisiensi Sekretariat Jenderal pada tahun 2023 sebesar 52,25%. Rumus efisiensi dan nilai efisiensi untuk NKA Enit Eselon I berdasarkan PMK 22 tahun 2021 sebagai berikut:

Rumus Efisiensi:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Rumus nilai efisiensi:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Rentang nilai efisiensi adalah -20 sampai dengan 20 dengan nilai efisiensi 0 sampai dengan 100. Rendahnya efisiensi, disebabkan oleh rendahnya selisih jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output program yang telah direncanakan dan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian output program dengan alokasi anggaran yang tersedia. Efisiensi selanjutnya akan berdampak kepada nilai efisiensi.

Semakin kecil gap antara yang direncanakan (pagu, target RO) dengan realisasi (capaian RO dan realisasi keuangan) maka nilai efisiensi akan semakin baik, yang





berarti nilai efisiensi bergantung kepada kualitas dari perencanaan. Pada tahun 2023 hal tersebut sulit dilakukan, karena adanya Automatic Adjustment (AA) dan perubahan alokasi anggaran mengakibatkan apa yang telah direncanakan tidak mudah terlaksana dengan optimal.

## 2) Rata-rata Nilai Kinerja Satker

Nilai rata-rata NKA Satker juga menunjukkan nilai yang belum maksimal. Sekretariat Jenderal memiliki 6 Satker, yang nilai NKA masing-masing satker memberikan kontribusi pada NKA Sekretariat Jenderal. Pencapaian NKA satker lingkup Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Capaian EKA/NKA Satker Sekretariat Jenderal tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian	86,31	98,89	99,58	100,00	1,11	52,78
2	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	89,38	93,77	99,07	100,00	6,23	65,57
3	Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian	86,41	98,81	99,87	100,00	1,19	52,98
4	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	98,24	99,10	91,64	100,00	19,79	99,47
5	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	87,90	99,52	99,88	100,00	3,17	57,92
6	Museum Tanah dan Pertanian	86,84	97,08	96,39	100,00	2,92	57,29
<b>Rata-rata Nilai Kinerja Setjen</b>		<b>89,18</b>					

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu, 2024

Berdasarkan tabel 7, dari 6 satker hanya 1 satker yang memiliki capaian NKA di atas target NKA Sekretariat Jenderal atau diatas 93,18, sedangkan 5 satker lainnya capaian NKA di bawah 93,18. Satker Sekretariat Jenderal yang memiliki NKA di atas 93,18 adalah satker dengan nilai efisiensi di atas 90%, sedangkan 5 satker lainnya dengan nilai NKA di bawah 93,18 memiliki nilai efisiensi yang rendah bahkan di bawah 70%. Dalam perhitungan nilai NKA Satker, efisiensi dan capaian RO memiliki bobot yang besar dalam menentukan nilai kinerja anggaran satker, seperti yang ditunjukkan pada tabel 8.







Tabel 8. Perhitungan NKA Satker lingkup Kementerian/Lembaga

Perhitungan NKA Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi	Capaian RO	43,50%
	Efisiensi RO	28,60%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,20%
	Penyerapan Anggaran	9,70%

Sumber: PMK 22 Tahun 2021

Capaian Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung fluktuatif. Penurunan capaian kinerja yang signifikan terjadi pada tahun 2021. Penurunan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2021 disebabkan:

- 1) Penerapan Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2021 yang tidak diikuti dengan perubahan pemahaman para pelaku perencanaan dan penganggaran;
- 2) Sejak awal diluncurkannya Aplikasi SMART tahun 2021 pada bulan Maret 2021, informasi kinerja Sekretariat Jenderal terutama untuk Output Program tidak selaras dengan informasi yang tercantum di dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024. Kebijakan terkait revisi informasi kinerja di dalam aplikasi SMART kurang fleksibel. Usulan Informasi kinerja Kementerian Pertanian yang telah disampaikan Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan, namun hingga akhir pelaporan kinerja ke dalam aplikasi SMART (15 Januari 2022) tidak tidak mendapatkan jawaban secara jelas dari Kementerian Keuangan.

Peningkatan NKA Sekretariat Jenderal Tahun 2023 tidak lepas dari upaya revisi informasi kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sejak awal. Upaya revisi informasi kinerja melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai Lembaga yang berwenang dalam proses revisi informasi kinerja. Diantara upaya yang dilakukan Biro Perencanaan tersebut diantaranya:

- a) Melaksanakan rapat pendahuluan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan pada tanggal 25 Juli Tahun 2023
- b) Menerbitkan Surat a.n Menteri Pertanian Nomor B-2921/RC.030/S/08/2023 Hal Permohonan Pembaharuan/Updating Indikator Kinerja pada Krisna Renja Kementerian Pertanian TA 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
- c) Mengikuti Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 22 September Tahun 2023

Permasalahan informasi Kinerja pada tahun 2023, dapat diselesaikan di penghujung tahun 2023, setelah melalui proses revisi yang dilakukan sejak bulan Juli Tahun 2023. Sekretariat Jenderal bersama Unit Eselon I lain yang mengalami permasalahan informasi kinerja, berusaha mengoptimalkan upaya pengajuan revisi





melalui berbagai cara yang ditempuh sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di Bappenas dan Kemenkeu.

Walaupun revisi informasi kinerja pada tahun 2023 berhasil diajukan dan diperbaiki, baik pada aplikasi Krisna Bappenas maupun aplikasi SMART Kemenkeu, namun antara periode pelaporan Triwulan I hingga Triwulan III, NKA lingkup Kementerian Pertanian, termasuk NKA Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, meraih capaian yang kurang baik karena belum diperbaikinya informasi kinerja pada periode tersebut.

Selama tahun 2023, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 yaitu:

**a. Workshop Pengisian Laporan pada Aplikasi SMART Tahun 2023**

Pemantauan nilai kinerja anggaran melalui aplikasi SMART tahun 2023 pada semua tingkatan dilakukan secara berkala, yaitu setiap bulan. Nilai kinerja seringkali tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan hingga pertengahan tahun atau pada semester I, sehingga dapat mencerminkan lambatnya kinerja Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai kinerja serta meningkatkan kapasitas penanggung jawab nilai kinerja anggaran maupun operator SMART terhadap perkembangan informasi terkini terkait kinerja anggaran, maka dilakukan workshop pelaporan melalui aplikasi SMART.

**b. Perbaikan Informasi Kinerja**

Informasi kinerja yang tertuang pada aplikasi SMART merupakan data yang bersumber dari aplikasi Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023, berdasarkan data tampilan pada aplikasi SMART terdapat kesalahan informasi kinerja Kementerian Pertanian, termasuk di Sekretariat Jenderal, yang berdampak kepada nilai kinerja anggaran Sekretariat Jenderal. Sehingga, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran Sekretariat Jenderal adalah memperbaiki informasi kinerja melalui aplikasi Renja, sebagai sumber data aplikasi SMART.

**c. Koordinasi Penyusunan Laporan Sasaran Strategis dan Laporan Akhir pada Aplikasi SMART Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023**

Komponen penilaian pada kinerja anggaran pada aplikasi SMART salah satunya adalah pemenuhan. Untuk menjamin pemenuhan laporan ini maka dilakukan koordinasi lingkup Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal dalam rangka memantau perkembangan pelaporan capaian target tahun 2023 yang telah diinput dan kesiapan laporan sebelum dilakukan penarikan data oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait *cleansing* data dan percepatan proses perbaikan informasi kinerja Kementerian Pertanian.

Dalam mendukung pencapaian target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023, Sekretariat Jenderal mendapat dukungan anggaran senilai Rp 100.041.087.000,- dengan serapan anggaran sampai dengan 31 Desember





2023 senilai Rp97.295.168.641,- atau 97,26%. Serapan anggaran tersebut jika dikaitkan dengan **analisis efisiensi sumber daya anggaran**, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 22/2021), Efisiensi untuk Indikator Kinerja Sasaran Program 1 yaitu Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 dalam pemanfaatan sumber daya anggaran yang perhitungannya ditunjukkan pada tabel 9.

Tabel 9. Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran Program Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023

TVK	RVK	%RVK	PAK	RAK	%RAK	PAK x % RVK	(PAK x % RVK)-RAK	Efisiensi ((PAK x %RVK)-RAK)/PAK
93,18	92,05	98,79%	100.041.087.000	97.295.168.641	97,26	98.830.589.847	1.535.421.206	0,015

$$\begin{aligned}
 NE &= 50\% + (0,015/20 \times 50) \\
 &= 0,5 + (0,015/20 \times 50) \\
 &= 0,5 + (0,037) \\
 &= 0,537 \text{ atau } 54\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumberdaya anggaran untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 sebesar 54%. Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021, unit kerja dikatakan memiliki efisiensi apabila gap antara perencanaan dan realisasi kecil, yang mencerminkan kualitas dari perencanaan yang baik.

### 3.1.4 Apresiasi Eksternal atas Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal sebagai Unit Kerja Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator, pembinaan dan pemberian layanan melakukan berbagai upaya dengan pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal. Adapun pada Tahun 2023, capaian kinerja lainnya yang diraih dapat dilihat pada tabel 10.

Apresiasi yang diberikan oleh pihak eksternal merupakan bukti keberhasilan kinerja Kementerian Pertanian dimata publik dalam memberikan pelayanan publik, inovasi pelayanan, kepatuhan terhadap peraturan dan upaya lainnya dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Penghargaan ini tidak hanya semata sebagai pembuktian upaya nyata Kementerian Pertanian yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, namun juga menjadi pemicu semangat untuk semakin meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.





Tabel 10. Daftar Penghargaan yang Diterima oleh Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Praktek Terbaik Inovasi Pelayanan Publik	Kementerian PAN-RB
2	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Ombudsman
3	BKN Award " Peringkat pertama untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar; dan Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik."	Badan Kepegawaian Negara
4	Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022	Kementerian PAN-RB
5	Anugerah Top Digital Implementation	IT Works
6	Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L	Kemenkominfo
7	Opini Kepatuhan Tertinggi	Ombudsman
8	Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2023

Penghargaan yang telah diraih oleh Kementerian Pertanian, merupakan hasil yang dilakukan oleh setiap pegawai Kementerian Pertanian sesuai tugas dan fungsinya masing-masing di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Dokumentasi dan penghargaan yang telah diraih tersebut secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023 pada awal penetapan adalah Rp1.473.598.597.000,- dalam perkembangan pagu tersebut mengalami perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga menjadi Rp1.339.017.899.000,-. Perubahan pagu anggaran dikarenakan antara lain karena penyesuaian belanja pegawai yang berasal dari blokir AA dan realokasi ke BA BUN, pemenuhan kekurangan belanja pegawai pada alokasi tunjangan kinerja dan pergeseran anggaran belanja pegawai ke belanja non operasional dalam rangka penguatan kehumasan dan pengelolaan informasi publik, Revisi mendukung Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebagai antisipasi terjadinya penurunan produksi, adanya penambahan dana hibah pada satker PSEKP, dan penambahan PNBPN di PPVTPP.

Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.326.392.582.093,- atau sebesar 99,06%. Realisasi anggaran per Eselon II atau realisasi anggaran Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal cukup tinggi yaitu di atas 95%, kecuali realisasi PSEKP yang hanya mencapai 93,77%. Rendahnya realisasi PSEKP diakibatkan oleh adanya sisa belanja pegawai akibat adanya perpindahan pegawai dari Kementerian





Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Secara rinci realisasi anggaran Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Sesuai amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan guna menjamin pengelolaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kinerja Pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja, dan peningkatan efisiensi anggaran belanja dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian IKPA Sekretariat Jenderal berdasarkan aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (Aplikasi OM-SPAN,) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini :

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN														
Sampai Dengan : DESEMBER														
No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	01801	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	73.31	96.12	91.14	99.13	96.76	100.00	95.53	94.14	100%	94.14
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.33	19.22	9.11	9.91	9.68	5.00	23.88			
			Nilai Aspek	86.66		96.63					95.53			

Gambar 10. Tampilan Capaian IKPA Sekretariat Jenderal Tahun 2023

### 3.3 Rencana Aksi Perbaikan

Pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang dilakukan atas evaluasi kinerja tahun 2022, karena pada prinsipnya pengelolaan kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu (*continuous improvement*). Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kinerja tahun 2023 maka perlu dilakukan upaya perbaikan atas permasalahan atau kendala yang muncul dalam pengelolaan kinerja tahun 2023. Upaya perbaikan disusun berdasarkan akar permasalahan yang dipilih atas permasalahan yang ada, sehingga diharapkan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Hasil capaian kinerja pada tahun 2023 juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upaya perbaikan kedepan.

Memperhatikan capaian dan permasalahan yang dihadapi saat ini, rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi meso untuk meningkatkan capaian kinerja reformasi birokrasi;
2. Melakukan koordinasi internal eksternal untuk merespon perubahan kebijakan yang ditetapkan;





3. Memperhatikan rekomendasi indikator RB general dari masing-masing instansi meso sebagai dasar penyusunan rencana aksi tahun 2024 dan berkoordinasi dalam rangka mengkoordinasikan RB tematik;
4. Masing-masing unit kerja segera menyusun rencana aksi peningkatan kinerja berdasarkan rencana aksi tahun 2023 yang belum selesai dilaksanakan dan hasil rekomendasi dari instansi penilai;
5. Melaporkan capaian output, capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi internal dan eksternal;
6. Merancang perencanaan penarikan dana (RPD) sebagai target realisasi, sehingga apabila terjadi perubahan dapat segera disesuaikan;
7. Meningkatkan dan melakukan perbaikan kualitas kualitas pelayanan publik

Rekomendasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk rencana aksi seperti ditunjukkan pada tabel 11.

Tabel 11. Rencana Aksi Perbaikan Tahun 2024

No	Uraian Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
<b>Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal</b>		
1	Berkoordinasi dengan bagian yang menangani revisi DIPA Sekretariat Jenderal terkait penyesuaian RPD pada halaman 3 DIPA sebagai target realisasi keuangan.	2024 (Setiap dilakukan revisi DIPA)
2	Melakukan pengawalan pada saat input data informasi kinerja ke dalam aplikasi KRISNA guna memastikan informasi kinerja di dalam Aplikasi KRISNA sudah sesuai dengan Renstra Sekretariat Jenderal.	2024 (setiap ada penyesuaian pada palikasi Renja)
3	Melakukan pertemuan kordinasi dan konsolidasi terkait Aplikasi SMART dan Aplikasi SAKTI dengan Biro/Pusat lingkup Kementerian Pertanian dengan lebih intensif lagi dan melibatkan Kementerian Keuangan	2024
4	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang sebelumnya	2024
<b>Reformasi Birokrasi</b>		
1	Berkoordinasi dengan instansi Meso untuk memperkuat sinergisitas penguatan upaya perbaikan	2024
2	Melanjutkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi terutama rencana aksi yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2023	2024
3	Menyusun dan melaksanakan rencana aksi secara detil berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi instansi meso pada indikator Reformasi Birokrasi	Maret 2024

Rencana aksi perbaikan yang harus dilakukan sesuai tabel 9 sebanyak 7 rencana aksi perbaikan. Seluruh rencana aksi ini penting untuk dilakukan pada tahun 2024 agar pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat lebih baik dibanding tahun 2023.







## BAB IV PENUTUP



Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Program dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Adapun Sasaran Program tersebut adalah: 1) Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan Indikator Kinerja Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal; dan 2) Terkelolanya Anggaran Sekretariat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi disampaikan bahwa kegiatan pengisian PMPRB telah dihentikan, sehingga capaian indikator Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal tahun 2022 yang disajikan adalah Nilai PMPRB Tahun 2021, dengan capaian 34,72 atau 105,31% dari target sebesar 32,97 dengan kategori capaian "**Sangat Berhasil**". Penghentian pelaksanaan PMPRB tidak menyebabkan upaya Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian ikut berhenti, maka pada tahun 2023, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi Berdampak, Sekretariat Jenderal menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 24 kegiatan utama. Indikator lainnya yaitu Nilai Kinerja Anggaran sekretariat Jenderal mencapai nilai 92,05 atau capaian kinerja sebesar 98,79% dari target sebesar 93,18 pada tahun 2023, atau dengan kategori "**Berhasil**".

Untuk meningkatkan capain kinerja pada tahun 2023, maka Sekretariat Jenderal akan melakukan berbagai upaya perbaikan yaitu dengan memperhatikan dokumen perencanaan terutama terkait anggaran, yaitu penyesuaian RPD pada saat dilakukannya Revisi DIPA apabila terdapat perubahan target realisasi anggaran, melakukan pengawalan dan pengawasan mulai dari proses perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaporan capaian output dan pelaporan pada aplikasi SAKTI dan SMART, melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil penilaian RB dari instansi meso, menindaklanjuti dengan melaksanakan rekomendasi dan rencana aksi RB dan berkoordinasi lebih intensif baik internal maupun eksternal. Upaya perbaikan ini ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tahun 2023, sehingga diharapkan tidak terulang kembali di tahun 2024.









# LAMPIRAN



Lampiran 1. Rincian Pegawai Sekretariat Jenderal tahun 2023

UNIT KERJA ES II SEKRETARIAT JENDERAL	GOLONGAN				PENDIDIKAN										JENIS KELAMIN		JUMLAH
	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	SM	S1	S2	S3	L	P	
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK		2	73	14			9		1	4	1	47	26	1	41	47	89
BIRO HUKUM		2	33	8			2				2	22	16	1	28	15	43
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI		0	57	14			2			1		36	29	3	31	40	71
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA		2	70	15			18			5		37	28		54	33	87
BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN		28	104	18	1	1	37			12		74	25		105	45	150
BIRO PERENCANAAN		2	61	16		1	3	1	2	1	1	39	26	6	47	32	79
BIRO UMUM DAN PENGADAAN	1	11	160	20		1	58		23			61	47	1	119	73	192
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN		7	76	22		1	15	1	5			49	32	2	51	54	105
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN		2	49	25			6		4			29	34	3	36	40	76
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN LITERASI PERTANIAN		8	39	20			6		12			25	21	3	37	30	67
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN		5	50	14	1		14		5			18	24	7	36	33	69
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>772</b>	<b>187</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>170</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>437</b>	<b>308</b>	<b>28</b>	<b>586</b>	<b>442</b>	<b>1029</b>

Sumber: SIM ASN Sekretariat Jenderal, 2023

## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

	<p><b>KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL</b></p> <p>JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 83/1200/KEBAYORAN PASAR MINGGU TELEPON (021) 7808131, 7804116, FAKSIMILI (021) 7803237 WEBSITE : <a href="http://www.pertanian.go.id">http://www.pertanian.go.id</a></p>
<hr/>	
<p><b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT JENDERAL.</b></p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>	
<p>Nama : Prihasto Setyanto Jabatan : Pjt. Sekretaris Jenderal Selanjutnya disebut pihak pertama</p>	
<p>Nama : Andi Amran Sulaiman Jabatan : Menteri Pertanian Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.</p>	
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
	<p>Jakarta, 27 November 2023</p>
<p>Pihak Kedua</p>  <p>Andi Amran Sulaiman</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>Prihasto Setyanto</p>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT JENDERAL**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal	32.97 Nilai
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	93.18 Nilai

**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

**ANGGARAN**

**KEGIATAN**

1746	Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian	Rp.	4.960.385.000,-
1747	Koordinasi dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian	Rp.	8.473.206.000,-
1749	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	9.165.094.000,-
1753	Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Rp.	21.712.567.000,-
4576	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum	Rp.	1.216.522.976.000,-
4577	Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan dan Perpustakaan Pertanian	Rp.	76.683.684.000,-

**TOTAL PAGU**

**Rp. 1.337.517.912.000,-**

Jakarta, 27 November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
Andi Angin Sulaiman

  
Prihasto Setyanto

Page Anggaran per Biro/Pusat Ilagkap Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Satker/Biro/Pusat	Rupiah Miliar (Rp)						MUB (Rp)	Total Page (Rp)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Non Operasional	Belanja Modal	PMSP (Rp)	MUB (Rp)		
1	SATELIT SETJEN	1.003.607.956.000	100.567.650.000	139.887.383.000	3.541.835.000	-	-	1.244.584.824.000	
	- Biro Hukum	-	2.130.000.000	4.950.385.000	584.000.000	-	-	7.674.385.000	
	- Biro Kerjasama Luar Negeri	-	4.139.520.000	8.479.296.000	593.210.000	-	-	13.205.796.000	
	- Biro Organisasi dan Kepegawaian	-	2.380.000.000	9.165.094.000	475.000.000	-	-	12.020.094.000	
	- Biro Perencanaan	-	3.782.000.000	13.148.537.000	1.042.300.000	-	-	23.972.837.000	
	- Biro Keselamatan dan BHM	1.003.607.956.000	3.590.000.000	13.475.646.000	190.000.000	-	-	1.020.713.600.000	
	- Biro Urusan dan Pengabdian	-	82.730.650.000	58.846.802.000	747.325.000	-	-	142.324.777.000	
	- Biro Humas dan Informasi Publik	-	1.875.680.000	22.794.715.000	-	-	-	24.670.395.000	
2	PUSDAKTI	8.200.000.000	12.464.650.000	13.178.575.000	1.024.219.000	-	-	34.869.442.000	
3	PEDEP	5.534.117.000	4.900.000.000	6.553.853.000	895.900.000	-	264.682.000	17.251.552.000	
4	PUSJARA	5.360.796.000	4.855.549.000	4.279.169.000	856.144.000	-	-	15.242.048.000	
5	PPVPPP	5.790.000.000	5.251.721.000	5.325.427.000	391.400.000	-	-	21.712.567.000	
6	MUSEUM TANAH DAN PERTANIAN	621.204.000	2.250.237.000	752.918.000	242.035.000	-	-	3.866.878.000	
	Jumlah	1.029.014.575.000	329.381.607.000	146.842.334.000	6.883.717.000	5.044.018.000	264.682.000	1.397.517.812.000	

Wakil Ketua



Agus Sulaksana

Jakarta, November 2023

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

Lampiran 3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Kementeeirian Pertanian Tahun 2023

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023**

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab (PJ)
1	Penyederhanan Birokrasi (Penyederhanan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Permentan OTK (Pusat dan UPT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut Pasca Penyederhanaan Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian, mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Kerja Pusat Kementerian Pertanian</li> <li>b. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian</li> <li>2. Penyusunan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan</li> <li>3. Penyusunan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Perkebunan</li> </ol>	Dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian</li> <li>2. Permentan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan</li> <li>3. Permentan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Perkebunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkan 2 Des 2022 Diundangkan 13 Des 2022</li> <li>2. Ditetapkan 17 Jan 2023 Diundangkan 30 Jan 2023</li> <li>3. Ditetapkan 17 Jan 2023 Diundangkan 30 Jan 2023</li> </ol>		Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja Evaluasi Organisasi)



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
				4. Penyusunan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat dan Kesehatan Hewan	4. Permentan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan	4. Ditetapkan 17 Jan 2023 Diundangkan 30 Jan 2023			
				5. Penyusunan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	5. Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	5. Ditetapkan 17 Jan 2023 Diundangkan 30 Jan 2023			
				6. Penyusunan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	6. Permentan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	6. Ditetapkan 17 Jan 2023 Diundangkan 30 Jan 2023			

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab (PJ)	
				<p>7. Penyusunan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian</p> <p>8. Penyusunan Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Tanah dan Pertanian</p> <p>9. Penyusunan rumusan Kelompok Tim Kerja Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian Pusat dan Unit Pelaksana Teknis.</p>	<p>7. Permentan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian</p> <p>8. Permentan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Tanah dan Pertanian</p> <p>9. Dokumen: a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Tentang Mekanisme pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan fungsional lingkup kantor pusat dalam mendukung capaian kinerja</p>	<p>7. Ditetapkan 17 Jan 2023 Diundangkan 30 Jan 2023</p> <p>8. Ditetapkan 17 Jan 2023 Diundangkan 30 Jan 2023</p> <p>9. Tanggal: a. 31 Januari 2023</p>			

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
					<p>b. Keputusan Menteri Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.</p> <p>c. Keputusan Menteri Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.</p>	<p>b. 5 Juni 2023</p> <p>c. 5 Juni 2023</p>			

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab (PJ)
			<p>2. Sosialisasi Keputusan Menteri Pertanian</p>	<p>Tersosialisasi Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi</p>	<p>1. Laporan sosialisasi Keputusan Menteri Nomor 278/KPTS/OT.0 50/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian</p> <p>2. Laporan sosialisasi Keputusan Menteri Nomor 279/KPTS/OT.0 50/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.</p>	<p>1. 7 Juni 2023</p> <p>2. 8 Juni 2023</p>		

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
			3. Evaluasi Kelembagaan Pusat Pasca Penederhanaan Birokrasi a. Unit Kerja Pusat Kementerian Pertanian b. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian	Evaluasi kelembagaan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	1. Laporan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Pertanian Pusat 2. Laporan Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Jan 2022 Des 2023  2. 14 Agustus 2023			
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	1. Persentase progress penerapan sistem kerja baru di Kementerian	1. Penyusunan kebijakan sistem kerja lingkup Kementerian 2. Rekonstruksi kebijakan kinerja ASN lingkup Kementerian	1. Penetapan kebijakan sistem kerja melalui Keputusan Menteri Pertanian 2. Revisi kebijakan kinerja ASN melalui Permentan No. 35 Tahun 2021 tentang Mjn Kinerja PNS	1. Kepmentan ttg Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian 2. Penetapan/Rancangan Permentan ttg Pengelolaan Kinerja ASN Lingkup Kementerian	1. Triwulan I  2. Triwulan IV		Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja Tata Laksana)	
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian	1. Desain Arsitektur SPBE, Permentan SPBE 2. Permentan SPBE Kementerian	1. Identifikasi Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian 2. Penyusunan draft Permentan SPBE	1. Penyesuaian Arsitektur SPBE sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis	1. Arsitektur SPBE yang sudah sesuai dengan Probis Kementan terbaru	1. Arsitektur SPBE: Bulan Juni - September 2023		Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
								Penanggung Jawab (PJ)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan Rancangan Permentan</li> <li>• Pembahasan</li> <li>• Harmonisasi</li> </ul>	<p>Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024.</p> <p>2. Penetapan Arsitektur SPBE Kementan melalui Peraturan Menteri</p>	<p>2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 4179/KPTS/TL.120/A/11/2022 Tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian</p> <p>3. Rumusan Rancangan Permentan</p> <p>4. Permentan 33 tahun 2023 tentang SPBE Kementerian Pertanian</p>	<p>3. Harmonisasi Permentan Februari s.d Mei 2023</p> <p>4. Pengesahan Juni 2023</p>		



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
								Penanggung Jawab (P.J)
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Desain Perencanaan Terintegrasi (Sistem Informasi BIMA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pertanian dan Sistem dan Penganggaran Pembangunan Pertanian Terintegrasi.</li> <li>Desain Sistem Informasi BIMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Pertanian (SP3T)</li> <li>Pengembangan Aplikasi Perencanaan Tingkat Pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Pertanian (SP3T)</li> <li>Pengembangan Aplikasi Perencanaan Tingkat Pusat</li> </ol>	Desember 2023	Kegiatan Koordinasi Integrasi Aplikasi Perencanaan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Pembahasan di Kantor dan Pencetakan Laporan</li> </ul> Kegiatan (50 orang x 2 kegiatan = 8.250.000) <ul style="list-style-type: none"> <li>Honorarium Narasumber/Pembahas = 76.200.000</li> <li>Koordinasi Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Pertanian (Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday) = 291.240.000</li> <li>Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Pertanian (Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan</li> </ul>	Biro Perencanaan



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• n Fullday dan Fullboard) = 224.648.000</li> <li>• Biaya Peta Spasial pada Aplikasi BIMA untuk 1 tahun (Rp 30.000.000)</li> </ul>		
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan sistem pelayanan publik digital (padu satu/layan an perizinan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan SOP Integrasi Aplikasi</li> <li>2. Perancangan dan pengembangan Portal perizinan Pertanian Terintegrasi dengan mengintegrasikan sistem login pada sistem perizinan RIPH, Simrek, Simpel 1, Simpel 2, HPT, PJTOH (Izin Usaha), Midoss, Berbagi pakai, Pendaftaran Varietas, Pelepasan Varietas</li> <li>3. Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft Panduan Pengembangan dan integrasi aplikasi</li> <li>Link: <a href="https://pertaniangoid.s harepoint.com/:f:/s/TE AMSOPDANSTANDARDI SASI/EjymDoZzQAhNvV HS2qroEmyBquXFeYu6i 8yLNvujA1S0DQ?e=bFH SRv">https://pertaniangoid.s harepoint.com/:f:/s/TE AMSOPDANSTANDARDI SASI/EjymDoZzQAhNvV HS2qroEmyBquXFeYu6i 8yLNvujA1S0DQ?e=bFH SRv</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft Panduan Pengembangan dan Aplikasi</li> <li>2. Draft SOP Integrasi Aplikasi Portal Sistem Perizinan Pertanian Elektronik</li> <li>3. Pengembangan: November 2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan draft Panduan Pengembangan dan Pengembangan Aplikasi: April – Agustus 2023</li> <li>2. Finalisasi panduan: September – Oktober 2023</li> <li>3. Pengesahan: November 2023</li> <li>4. Januari - Desember 2023</li> </ol>	308.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian</li> <li>2. Pusat PVTPP</li> </ol>	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
								Penanggung Jawab (PJ)
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Bertambahnya jumlah unit kerja predikat WBK dan WBBM	Penilaian, Pendampingan, dan Monev WBK/WBBM	80% unit kerja Kementan yang dinilai TPI berpredikat WBK/WBBM	Laporan Hasil Penilaian, Pendampingan, dan Monev Zi-WBK/WBBM	Februari - Oktober 2023	1.072.544.000 (Penilaian dan Monev WBK/WBBM)	Inspektorat Jenderal
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Internalisasi Permentan No 38 Tahun 2020, tentang Penerapan MRI Lingkup Pertanian</li> <li>Internalisasi Permentan No 8 Tahun 2022 tentang SPIP Lingkup Kementerian Pertanian</li> <li>Bimtek LKE PerBPKP 5 Tahun 2021 ttg Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada K/L/D</li> <li>Penjaminan Kualitas (PK) terhadap Hasil Penilaian Mandiri (PM) oleh Eselon I</li> <li>Penilaian Mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Pertanian</li> </ol>	Nilai Maturitas SPIP pada Level III (Terdefinisi) dengan nilai 3,5	Laporan PK Penyelenggaraan Maturitas SPIP Kementerian	Juli - Agustus 2023	540.450.000 (Penjaminan Kualitas Maturitas SPI) – Inspektorat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat Jenderal</li> <li></li> </ol>
					5. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian hasil evaluasi oleh BPKP	5. Tanggal 9 Oktober entry meeting tim evaluator BPKP, tanggal 10 s.d 12 Oktober	Rp.195.000.000	3. Biro Keuangan dan BMN

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
								Penanggung Jawab (PJ)
			6. Penyusunan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja lingkup Kementerian Pertanian		6. Konsep Kertas Kerja Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja lingkup Kementerian Pertanian Bahan dan notulen	Evaluasi oleh BPKP 6. September - Desember 2023 (Penyusunan Konsep Kertas Kerja Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP)		
			7. Sosialisasi lingkup Sekretariat Jenderal • Kepmentan Nomor 817/KPTS/OT.050/M/11/2022 tentang Unit Manajemen Risiko lingkup Kementerian Pertanian; • Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4252/KPTS/PW.420/A/11/2022 tentang Unit Pengelola Risiko lingkup Sekretariat Jenderal; • Surat Tugas Kepala Biro Perencanaan Nomor 2422/OT.050/A1/12/2022 tentang Unit Pengelola Risiko Biro Perencanaan	Tersosialisasinya lingkup Sekretariat Jenderal : • Kepmentan Nomor 817/KPTS/OT.050/M/11/2022 tentang Unit Manajemen Risiko lingkup Kementerian Pertanian; • Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4252/KPTS/PW.420/A/11/2022 tentang Unit Pengelola Risiko lingkup Sekretariat Jenderal; • Surat Tugas Kepala Biro Perencanaan Nomor 2422/OT.050/A1/12/2022 tentang Unit Pengelola Risiko Biro Perencanaan				4. Biro Perencanaan

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
			8. Rancangan worksheet manajemen risiko lingkup Sekretariat Jenderal	Tersusunnya Rancangan worksheet manajemen risiko lingkup Sekretariat Jenderal	Rancangan worksheet manajemen risiko lingkup Sekretariat Jenderal	Desember 2023	Pengelolaan Risiko Lingkup Kementerian Pertanian (Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard) = 134.206.000		
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pelaporan dan Tindak Lanjut pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	1. Pengelolaan Dumas 2. Telaah dan ATT Dumas	Tindak lanjut Pelaporan Dumas 100%	1. Laporan Dumas 2. Laporan Telaah dan ATT Dumas	Januari - Desember 2023	4.427.700.000 (ATT dan AI)	Inspektorat Jenderal	
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	1. Survei Mandiri Persepsi Anti Korupsi 2. Survei Mandiri Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK dan SPKP) 3. Kegiatan Peringatan HAKORDIA 2023	85% unit kerja yang disurvei dengan nilai $\geq 3$ skala 4	1. Laporan Hasil Survei Mandiri Persepsi Anti Korupsi 2. Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik 3. Laporan Kegiatan HAKORDIA 2023	Februari - Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>609.998.000 (Survei Mandiri IPAK dan IPKP)</li> <li>829.450.000 (HAKORDIA)</li> </ul>	Inspektorat Jenderal	



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Peningkatan Kualitas Kebijakan (IKK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda Setting</li> <li>2. Formulasi Kebijakan</li> <li>3. Implementasi Kebijakan</li> <li>4. Evaluasi Kebijakan</li> </ol>	Terlaksananya Tata Kelola Kebijakan Publik	Persentase pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik yang berkualitas (Target 80%)	Januari – Desember 2023	54.825.000	Biro Hukum	
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pemetaan dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Peraturan undangan</li> <li>2. Rancangan Peraturan undangan</li> <li>3. Harmonisasi Peraturan undangan</li> <li>4. Rancangan Peraturan undangan</li> </ol>	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan (Target 80%)	Januari – Desember 2023	200.000.000	Biro Hukum	
12	Pelaksanaan Arsip Digital	1. Nilai Indeks pengelolaan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Arsip <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusutan Arsip</li> <li>• Pemindahan</li> <li>• Pemusnahan</li> <li>• Penyerahan</li> </ul> </li> <li>2. Penataan Arsip <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemindahan</li> <li>• Pemusnahan</li> <li>• Penyerahan</li> </ul> </li> <li>3. Alih Media Arsip</li> <li>4. Pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Arsip <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 Box Arsip Gedung</li> <li>• Arsip Unit Kearsipan I</li> <li>• 2500 Box Arsip pada Unit Kerja Eselon I</li> <li>• Lingkup Kementan</li> </ul> </li> <li>2. Penyusutan Arsip <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemindahan dari unit pengolah ke unit Kearsipan I sebanyak 12 kali pemindahan</li> <li>• 3 kali/tahun (Tahap 1; Tahap 2 ; Tahap 3)</li> <li>• 1 kali penyerahan arsip dari Kementan ke ANRI</li> </ul> </li> <li>3. Alih Media Arsip – 25.000 Lembar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Arsip Inaktif</li> <li>2. Daftar Arsip Inaktif Usul Serah Berita Acara Pemindahan dan Daftar Arsip pemindahan</li> <li>3. Berita Acara Laporan Pemusnahan Arsip</li> <li>4. Laporan Penyerahan Arsip Statis</li> <li>5. Berita Acara dan Daftar Arsip Alih Media serta Arsip</li> </ol>	Januari – Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 496.139.000 (Penataan, Penyusutan, dan Alih Media Arsip)</li> <li>• 180.800.000 (Pengawasan)</li> <li>• 228.200.000 (Pembinaan Kearsipan)</li> </ul>	Biro Umum dan Pengadaan	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
			5. Pembinaan Kearsipan	4. 20 Objek yang terdiri dari unit Pengolah Eselon I dari Unit Kearsipan II 5. Sosialisasi, Bimtek, Diklat, Ujikom Kearsipan	Digital Hasil Alih Media 7. Laporan Audit Kearsipan Internal Hasil Pengawasan Kearsipan Kementan dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan) 9. Laporan Pembinaan Kearsipan				
		2. Implementasi Srikandi	Bimbingan Teknis dan pendampingan implementasi Srikandi	Implementasi Aplikasi SRIKANDI pada 10 Unit Kerja Eselon I	Laporan Implementasi Aplikasi Srikandi	Januari – Desember 2023	235.426.000		Biro Umum dan Pengadaan
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	1. Pemetaan Data Statistik Sektoral Kementan dan Kebermanfaatan Agriculture War Room (AWR) 2. Menentukan usulan pengumpulan data statistik sektoral	1. Pembentukan Tim Internal Evaluasi Statistik Sektoral (EPSS) Kementerian Pertanian 2. Menentukan usulan pengumpulan data statistik sektoral untuk penilaian EPSS	Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kementerian Pertanian:  • 2 usulan kegiatan pengumpulan data statistik sektoral untuk penilaian EPSS	Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1569/KPTS/OT.050/A/05/2023 Tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kementerian Pertanian: • Data Statistik Sektoral Hortikultura, dan Peternakan	Januari – Desember 2023			Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
								Penanggung Jawab (PJ)
			<p>untuk penilaian EPSS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil ujicoba EPSS, Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Pertanian tahun 2022 memperoleh 2,91 dengan predikat Baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Pertanian tahun 2023 memperoleh 3,58 dengan predikat Sangat Baik</li> </ul>	<p>dan Kesehatan Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2023 yang akan diumumkan September 2023</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rincian Hasil Ujicoba Indeks Pembangunan Statistik sebagai Berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Domain 1 Prinsip Satu Data <ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia nilai 3,25</li> <li>Domain 2 Kualitas Data nilai 2,62</li> <li>Proses Bisnis Statistik nilai 2,68</li> <li>Kelembagaan nilai 3,18</li> <li>Statistik Nasional nilai 2,67</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target Indeks Pembangunan Statistik 2023 sebagai Berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Domain 1 Prinsip Satu Data Indonesia nilai 3,52</li> <li>Domain 2 Kualitas Data nilai 3,42</li> <li>Proses Bisnis Statistik nilai 3,38</li> <li>Kelembagaan nilai 3,68</li> </ul> </li> <li>Statistik Nasional nilai 3,57</li> </ul>	<p>Rincian Hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2023 yang diumumkan September 2023</p>				
		<p>2. Pemetaan Data Statistik Sektoral Kementan</p>						



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
								Penanggung Jawab (PJ)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Statistik Tanaman Pangan : data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan.</li> <li>Statistik Hortikultura : Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Hortikultura.</li> <li>Statistik Peternakan: Populasi dan Produksi.</li> <li>Statistik Perkebunan : Luas Areal, dan Produksi dan Produktivitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Statistik Tanaman Pangan: data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan.</li> <li>Statistik Hortikultura : Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Hortikultura.</li> <li>Statistik Peternakan: Populasi dan Produksi.</li> <li>Statistik Perkebunan : Luas Areal, Produksi dan Produktivitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan (2021-2022)</li> <li>Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Hortikultura (2021-2022)</li> <li>Data Populasi dan Produksi (2021-2022)</li> <li>Data Luas Areal, Produksi dan Produktivitas (2021-2022)</li> </ul>			
			<p>3. Pemanfaatan Agriculture War Room (AWR) untuk pemodelan kebijakan pertanian pembangunan berupa Dashboard Data-data Pertanian</p>	<p>Pemanfaatan AWR untuk pemodelan kebijakan pertanian berupa Dashboard Decision Support System</p>	<p>Dashboard Decision Support System</p>			

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab (PJ)
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1. Nilai indek PBJ Penguatan Kapabilitas SDM PPBJ	a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan : 1. Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 2. e-Tendering 3. e-Purchasing 4. Toko Daring 5. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing 6. e-Kontrak	1. Rencana umum pengadaan terumuskan 100% untuk T.A. 2023 dan 100% untuk T.A. 2024 sebelum berakhirnya penilaian ITKP (cut-off) 31 Maret 2024. 2. Pelaksanaan e-procurement dapat terealisasi sesuai dengan jadwal sesuai rencana pada aplikasi SiRUP 3. Meningkatkan pembelian produk PDN dan UMKK pada aplikasi e-purchasing dan meningkatnya produk tayang pada aplikasi e-purchasing 4. Meningkatkan transaksi pembelian melalui toko daring sebagai bentuk cinta dan bangga terhadap produk dalam negeri. 5. Meningkatkan proses pengadaan langsung, penunjukan langsung dan swakelola melalui aplikasi SPSE (non tender, pencatatan non tender dan pencatatan swakelola) dan tidak ada lagi proses pengadaan secara manual. 6. Meningkatkan ketaatan PPK dalam melaksanakan kontrak melalui aplikasi e-kontrak serta melakukan input nilai PDN pada aplikasi SPSE	1. Tingkat kepatuhan SiRUP  2. Realisasi transaksi pengadaan barang/jasa	Januari - Desember 2023  Januari - Desember 2023	2.402.621.000	Biro Umum dan Pengadaan (UKPBJ)

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab (PJ)
		b. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)		Peningkatan jumlah SDM PPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah personel bersertifikat kompetensi level 1 Tingkat kematangan UKPBJ pada aplikasi <a href="https://siukpbj.lkp.p.go.id">https://siukpbj.lkp.p.go.id</a>	Januari - Desember 2023		
		c. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pelatihan, Workshop dan Pembinaan kepada pengelola pengadaan barang/jasa satker lingkungan Kementerian Pertanian		Peningkatan level kematangan UKPBJ Kementerian Pertanian untuk Variabel manajemen pengadaan, manajemen resiko dan manajemen kinerja menjadi level proaktif  1. Pelaksanaan pelatihan dan workshop terkait dengan peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2. Pembinaan pengadaan barang/jasa kepada seluruh personel PPBJ di satker lingkup Kementerian Pertanian	1. Jumlah pelatihan dan workshop PPBJ  2. Jumlah satker yang dibina	Januari - Desember 2023		

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	1. Penyusunan PP, PMK dan Permentan tentang Tarif PNBPN	Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<p>1. PP, PMK dan Permentan tentang Tarif PNBPN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian</li> <li>• PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</li> <li>• Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.</li> </ul>	Januari - Oktober 2023		Biro Keuangan dan BMN

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
								Penanggung Jawab (PJ)
			2. Revisi Permentan tentang moda transportasi Udara		2. Pencabutan Permentan dan Penerbitan Kepmentan tentang moda transportasi udara: <ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Menggunakan Moda Transportasi Pesawat Udara bagi Pejabat Lingkup Kementerian</li> <li>Kepmentan Nomor 412/KPTS/TU.04 0/M/07/2023 tentang Kebijakan Perjalanan Dinas Menggunakan Moda Transportasi Pesawat Udara</li> </ul>			

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
			<p>3. Membangun aplikasi E-Perjadin</p> <p>4. Membangun aplikasi SIPA BMN</p>		<p>Dalam Hal Tertentu Bagi Pejabat Lingkup Kementerian Pertanian</p> <p>3. Aplikasi E-Perjadin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Nomor B-1420/KU.010/A.4/01/2023</li> </ul> <p>4. Aplikasi SIPA BMN (Sistem Informasi Pengusulan Administrasi BMN)</p> <p>5. Surat Rilis No. B-8733/PL.310/A.4/09/2023</p>				
16	Penataan Jabatan Fungsional (JF)	Progres Tindak Lanjut Penataan Jabatan Fungsional bidang Pertanian	<p>1. Penyusunan pedoman penghitungan kebutuhan dan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian</p> <p>2. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</p>	<p>1. Tersusunnya rancangan pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian</p> <p>2. Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jabatan</p>	<p>1. Dokumen Rancangan pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian</p> <p>2. Dokumen Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara</p>	<p>1. Juli s.d Desember 2023</p> <p>2. Oktober s.d Desember 2023</p>	-	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Sub JF)	



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
			<p>Reformasi Birokrasi Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian</p> <p>3. Penyederhanaan jenis dan rumpun Jabatan Fungsional Bidang Pertanian</p>	<p>Fungsional di Bidang Pertanian</p> <p>3. Tersusunnya rancangan klasifikasi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian</p>	<p>dan Reformasi Birokrasi Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian</p> <p>3. Dokumen Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian</p>	<p>3. Oktober s.d Desember 2023</p>			
17	Penguatan Manajemen talenta ASN	Tersedianya profil talenta jabatan struktural	<p>1. Penilaian potensi dalam rangka akuisisi talenta (gelombang I grup 1)</p> <p>2. Penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan penetapan rancangan Permentan Manajemen Talenta ASN</p> <p>3. Penilaian Potensi dalam rangka akuisisi talenta (Gel I grup 2)</p>	<p>1. Profil Talenta Struktural untuk 5 unit eselon 1</p> <p>2. Penetapan Permentan Manajemen Talenta ASN</p> <p>3. Profil Talenta Struktural untuk 5 unit eselon 1</p>	<p>1. Laporan potensi pegawai</p> <p>2. Permentan Manajemen Talenta ASN</p> <p>3. Laporan potensi pegawai</p>	<p>1. Maret 2023</p> <p>2. September- Oktober 2023</p> <p>3. Oktober 2023</p>	<p>1. 81.750.000</p> <p>2. 15.100.000</p> <p>3. 163.500.000</p>	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja Pengembangan Karir)	
18	Pelaksanaan Learning of Development serta digital mindset ASN	Data Pelaksanaan kegiatan pengembangan pegawai dan	<p>1. Pengembangan Pegawai melalui Tugas Belajar</p>	<p>1. Pemberian tugas belajar kepada 154 pegawai</p>	<p>1. Laporan evaluasi pemberian tugas belajar</p>	<p>1. Februari dan September 2023</p> <p>2. 1.147.250.000</p>	<p>1. 15.012.890.000</p> <p>2. 1.147.250.000</p>	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja)	



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Jawab (PJ)	
		digital mindset ASN yang dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Kepemimpinan Nasional II</li> <li>Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V</li> <li>Uji Kompetensi jabatan fungsional dalam rangka kenaikan jenjang jabatan (2 periode)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Nasional II 30 peserta</li> <li>Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 30 peserta</li> <li>Terselenggaranya uji kompetensi jabatan fungsional Kementerian Pertanian kepada 500 peserta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Nasional II</li> <li>Laporan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>Laporan pelaksanaan Uji Kompetensi jabatan fungsional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Juli s.d. November 2023</li> <li>Februari s.d. Juni 2023</li> <li>Periode 1 pada bulan Mei dan periode 2 pada bulan Oktober 2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>483.219.000</li> <li>59.000.000 (periode 1) 50.000.000 (periode 2)</li> </ol>	Pengembangan Karir)	Penanggung Jawab (PJ)
19	Pelaksanaan transformasi digital ASN	Data pelaksanaan rekrutmen melalui transformasi digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seleksi penerimaan calon PPPK melalui aplikasi SSCASN-BKN</li> <li>Pengusulan NI-PPPK yang lulus seleksi menggunakan aplikasi SIASN-BKN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Seleksi penerimaan calon PPPK melalui aplikasi SSCASN-BKN</li> <li>Penetapan usulan NI-PPPK</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumuman Seleksi Penerimaan PPPK Kementan T.A. 2022</li> <li>Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (Pra-Sangguh)</li> <li>Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (Pasca-Sangguh)</li> <li>Pengumuman Pelaksanaan Seleksi</li> </ul>	Januari - Juni 2023		Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja Perencanaan Pegawai)	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
					<p>Kompetensi Teknis PPPK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Teknis</li> <li>▪ Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pengadaan PPPK Kementan</li> <li>▪ Daftar usulan NI-PPP ke BKN</li> <li>▪ Keputusan/ Kontrak Kerja PPPK</li> </ul> <p>Juni - Agustus 2023</p>				
20	Pengelolaan pegawai ASN berbasis digital	Persentase Penerapan Digitalisasi/Integrasi Kebijakan ASN Kementan	Pengembangan Integrasi kepegawaian: ePersonal dan aplikasi SIMASN,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Validasi data SIM ASN</li> <li>2. Pengembangan Aplikasi ePersonal (SINERGI dan Ekehadiran)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan beberapa script dan database SIM ASN</li> <li>2. Pengembangan menu aplikasi; menu evaluasi pelaporan kinerja bagi pejabat fungsional, menu rekap perolehan angka kredit berbasis konversi SKP, Dashboard Kinerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIM ASN</li> <li>2. Triwulan III</li> <li>3. Triwulan IV</li> </ol>		Biro Organisasi dan Kepegawaian (Kelompok Mutasi, Tim Kerja Tata Laksana, Tim Kerja Kinerja Pegawai, Tim Kerja Perencanaan Pegawai)	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja	
								Penanggung Jawab (PJ)	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Integrasi aplikasi kepegawaian Kementan dengan SI ASN BKN</li> <li>4. Penyiapan Server Cadangan Mesin Presensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Keselarasan data kinerja pegawai antara SINERGI dengan SI ASN BKN.</li> <li>4. Register mesin presensi bagi UPT tertentu.</li> </ul>	4. Triwulan IV			
21	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Persentase Penerapan Kebijakan Kinerja Pegawai bagi ASN Kementan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja</li> <li>2. Pemantauan dan evaluasi indikator kinerja individu dan output kinerja</li> <li>3. Penerapan Mandatory IKI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pelaporan kinerja bagi pegawai dgn predikat sangat baik, dan dibawah baik, dan pejabat fungsional</li> <li>2. Evaluasi IKI dan output kinerja pegawai</li> <li>3. Penerapan IKI Mandatory Arsiparis dan APK APBN dan PAPPK APBN lingkup Kementan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi hasil evaluasi pelaporan kinerja periodik</li> <li>2. Hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pegawai.</li> <li>3. Pemantauan penerapan IKI Mandatory</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) bulan setelah periode triwulan berakhir</li> <li>2. 1 (satu) bulan setelah periode triwulan berakhir</li> <li>3. Laporan pemantauan</li> </ul>		Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja Tata Laksana)	
22	Penguatan Sistem Merit	- Nilai Indeks Sistem Merit - Nilai indeks implementasi manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan penilaian mandiri sistem merit</li> <li>2. Entry penilaian meeting penerapan sistem merit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu dan pemenuhan bukti dan dokumen kuesioner penilaian mandiri penerapan sistem merit</li> <li>2. Reviu atas rekomendasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bersama KASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kuesioner penilaian mandiri penerapan sistem materi</li> <li>2. Hasil reviu dan progres tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem merit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Februari – November 2023</li> <li>2) 3.750.000 (exit meeting/ pelaksanaan penilaian)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 3.750.000 (Persiapan penilaian mandiri sistem merit)</li> <li>2) 3.750.00 (exit meeting/ pelaksanaan penilaian)</li> </ul>	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja Pengembangan Karir, Perencanaan Pegawai, dan Kinerja Pegawai)	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab (PJ)
			<p>3. Pelaksanaan <i>(exit meeting)</i> penilaian penerapan sistem merit</p>	<p>3. Peningkatan indeks penerapan sistem merit dalam manajemen ASN</p>	<p>3. Hasil penilaian penerapan sistem merit dari KASN</p>			
23	Pelaksanaan Core Values ASN	Progres penerapan core values/Indeks BerAKHLAK	<p>1. Perencanaan dan Pelaksanaan, Perkembangan Evaluasi dan Survei Core Values ASN BerAKHLAK</p> <p>2. Penyelenggaraan Aktivasi Nilai Core Values ASN BerAKHLAK Unit Kerja</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi internalisasi Values BerAKHLAK</p> <p>Perkembangan Pelaksanaan Hasil hasil penyelenggaraan Penguatan nilai nilai Core Values ASN BerAKHLAK</p>	<p>1. Nilai Indeks Budaya Kerja ASN Tahun 2023;</p> <p>2. Rekomendasi perbaikan dan penguatan budaya kerja ASN Kementan.</p>	<p>1. Nilai Indeks Kualitas Mutu Core Values ASN BerAKHLAK</p> <p>2. Terselenggaranya Informasi, ekspektasi pelaksanaan Core Values ASN BerAKHLAK (Baliho, Banner, Video, Testimoni, dll).</p> <p>3. Rekomendasi Unit Kerja Dalam Penguatan Nilai Core Values ASN BerAKHLAK</p> <p>4. Laporan Rekomendasi Before after Penguatan Nilai Core Values ASN BerAKHLAK</p>	Agustus – Desember 2023	Rp. 166.630.000,	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja Budaya Kerja)



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja
								Penanggung Jawab (PJ)
24	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Progres pelaksanaan pelayanan publik bidang pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>2. Penjarangan, Pembinaan dan Reviu Dampak layanan Publik Berbasis Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis On line</li> <li>4. Reviu dan Penerapan Sistem informasi Pelayanan Publik Berbasis On line</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi LAPOR SP4N Layanan Publik</li> <li>6. Penyelenggaraan dan Perbaikan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)</li> <li>7. Penyelenggaran, Evaluasi, Penilaian dan Penetapan Pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kategori Pelayanan Prima;</li> <li>2. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan Top Inovasi Terpuji (Top 45) Tahun 2023;</li> <li>3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan kategori Sangat Baik;</li> <li>4. Sistem informasi pelayanan publik Kementan terintegrasi dengan SIPPN.</li> <li>5. Sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terhubung dengan SP4N LAPORI</li> <li>6. Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik Kementan;</li> <li>7. Pemberian penghargaan Abdibaktitani bagi UKPP berprestasi bidang pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)</li> <li>2. Apresiasi dan Penghargaan Unit Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 dan TOP 45</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>4. Integrasi Pelayanan Publik menuju Mall Pelayanan Publik Tersusunnya Laporan SP4N Layanan Publik</li> <li>6. Tersusunnya Laporan Rekomendasi Before After Perkembangan Pelayanan Publik di Unit Kerja Layanan Publik</li> <li>7. Pemberian Apresiasi dan Penghargaan</li> </ol>	Januari s.d Desember 2023	Rp. 300.700.000,-	Biro Organisasi dan Kepegawaian (Tim Kerja Budaya Kerja)

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Target Tahunan 2023	Output	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab (PJ)
			Publik Berprestasi Bidang Pertanian;		Pelayanan Publik Bidang Pertanian Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.			
			8. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.	8. Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Kategori Kepatuhan Tertinggi pada Tahun 2023.	8. Tersusunnya Standar Pelayanan Publik BSIP dan Unit lainnya.			
			9. Bimbingan Teknis Prima Penyusunan Standar Pelayanan Publik	9. Tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Publik pada UPT lingkup BSIP	9. Tersusunnya Standar Pelayanan Publik BSIP dan Unit lainnya.			

MENTERI PERTANIAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.  
196908161995031001

Lampiran 4. Nilai Kinerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian TA 2023

**REKAP NK ESELON I LINGKUP KEMANTAN TA 2023 (Update 30 Januari 2024 Pukul 10.15)**

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	Sekretariat Jenderal	92,05	99,96	99,01	92,45	99,91	0,9	52,25	89,18
2	Inspektorat Jenderal	90,72	100	97,51	93,24	100	2,86	57,15	86,01
3	Ditjen Tanaman Pangan	84,89	100	94,58	85,26	99,49	-4,21	39,475	76,69
4	Ditjen Hortikultura	87,33	100	97,28	81,6	100	-3,92	40,2	81,56
5	Ditjen Perkebunan	90,40	100	90,22	92,05	100	15,97	89,925	82,55
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,52	100	97,38	87	100	0,94	52,35	84,45
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	89,92	100	98,1	95,35	100	0,2	50,5	84,89
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	92,81	100	95,89	94,51	100	6,48	66,2	89,3
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	90,72	100	98,78	98,92	100	4,05	60,125	85,35
10	Badan Karantina Pertanian	91,64	100	99,27	98,1	100	0,73	51,825	88,01

Sumber: SMART Kemenkeu, 2023



Lampiran 5. Daftar Apresiasi yang Diperoleh Kementerian Pertanian melalui Koordinasi Sekretariat Jenderal

No	Penghargaan	Dokumentasi
1.	<p><b>Penghargaan Praktek Terbaik Inovasi Pelayanan Publik.</b> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus memastikan reformasi birokrasi berdampak langsung ke masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan publik. Sebagai kunci transformasi, inovasi juga dibutuhkan untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis. Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan kepada Top Inovasi Terpuji, salah satunya diraih oleh Kementerian Pertanian.</p>	 <p>Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada inovasi BIOTRON dari BBPP Binuang.</p>
2.	<p><b>Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023</b> Pada 14 Desember 2023 Kementerian Pertanian meraih penghargaan dari Ombudsman RI atas capaian prestasi Peringkat 3 Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dengan kategori Kepatuhan Tertinggi masuk dalam Zona Hijau kelompok Kementerian.</p>	 <p>Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023</p>
3.	<p><b>Penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022</b> Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). ASN Culture Fest 2022 adalah festival virtual best implementation budaya kerja ASN BerAKHLAK yang diselenggarakan Kemenpan-RB dan diikuti 90 instansi pemerintah terdiri atas kementerian dan lembaga. Penyerahan penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022</p>	 <p>Penyerahan penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)</p>
4.	<p><b>BKN Award 2023</b> BKN mengumumkan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN. Kementerian Pertanian berhasil meraih 2 penghargaan yaitu:</p>	 <p>BKN Award 2023</p>

No	Penghargaan	Dokumentasi
	Peringkat pertama untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Tingkat Kementerian Tipe Besar; dan Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik.	
5	<p><b>Anugerah Top Digital Implementation 2023</b></p> <p>Kementerian Pertanian pada tahun 2023 kembali meraih penghargaan untuk dua penghargaan sekaligus dalam ajang Top Digital Awards 2023. Adapun penghargaan yang diterima yaitu 'Top Digital Implementation 2023 #Level Stars 4' untuk Pusdatin Kementerian Pertanian dan 'Top Leader on Digital Implementation 2023' untuk Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.</p>	 <p>Kementan dianugerahi <i>Top Digital Implementation 2023 level star &amp; Top Leader on Digital Implementation 2023</i></p>
6	<p><b>Penghargaan Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023</b></p> <p>Kementerian Kominfo menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi SPBE Nasional. Kegiatan ini bertujuan sebagai apresiasi kepada instansi yang telah mewujudkan e-Government yang baik dan membantu interoperabilitas antar sistem informasi di lingkungan instansi badan pemerintah, diantaranya Kementerian Pertanian melalui Pusdatin.</p>	 <p>Pemberian Penghargaan Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat K/L Tahun 2023</p>
7	<p><b>Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman RI</b></p> <p>Ombudsman RI merilis hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Penilaian itu dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Tiga lembaga dengan peringkat tertinggi pada kategori kementerian yaitu Kementerian Luar Negeri dengan nilai 94,85, Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 92,91, serta Kementerian Pertanian dengan nilai 91,45.</p>	 <p>Penghargaan Opini Kepatuhan Tertinggi Tahun 2023 dari Ombudsman</p>

No	Penghargaan	Dokumentasi
8	<p><a href="#">Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023</a></p> <p>Kementerian Pertanian RI menerima penghargaan kategori Kementerian Terbaik, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (19/12/2023). Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Kementan sebagai salah satu badan publik terinformatif dinilai oleh KIP secara proaktif telah menyediakan informasi publik secara akurat dan benar dan memiliki inovasi dalam penyediaan informasi public</p>	<div data-bbox="865 286 1326 600" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="794 618 1396 712">Kementerian Pertanian mendapat penghargaan "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Kategori Kementerian Terbaik"</p>

Lampiran 6. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian per Eselon II TA 2023

NO	ESELON II	PAGU	REALISASI	%	SISA PAGU (RP)
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>	<b>1.339.017.899.000</b>	<b>1.326.392.582.093</b>	<b>99,06</b>	<b>12.625.316.907</b>
1	BIRO PERENCANAAN	23.972.837.000	23.817.450.502	99,35	155.386.498
2	BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	12.020.094.000	11.917.620.101	99,15	102.473.899
3	BIRO HUKUM	7.674.385.000	7.618.102.664	99,27	56.282.336
4	BIRO KEUANGAN DAN BMN	1.020.713.600.000	1.011.106.677.631	99,06	9.606.922.369
5	BIRO UMUM DAN PENGADAAN	142.327.777.000	141.763.823.219	99,60	563.953.781
6	BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI	13.205.736.000	13.168.005.066	99,71	37.730.934
7	BIRO HUMAS DAN IP	24.670.395.000	24.364.761.262	98,76	305.633.738
8	PUSDATIN	34.859.442.000	34.501.071.015	98,97	358.370.985
9	PPVTPP	21.712.567.000	21.621.354.547	99,58	91.212.453
10	PUSTAKA dan MUSEUM TANAH	19.109.527.000	18.847.386.041	98,63	262.140.959
11	PSEKP	18.751.539.000	17.666.330.045	94,21	1.085.208.955



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung A  
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550

Telp. (021) 780 4055, Fax (021) 780 4237  
[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)